

SKRIPSI

**SISTEM BAGI HASIL KANDE TONGKONAN DALAM
LEMBANG TUMBANG DATU KECAMATAN SANGALLA
UTARA KABUPATEN TANA TORAJA**



**OLEH
LOLYTA ELISABETH LINTIN
B111 12 142**

**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

**SISTEM BAGI HASIL KANDE TONGKONAN DALAM
LEMBANG TUMBANG DATU KECAMATAN SANGALLA
UTARA KABUPATEN TANA TORAJA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian studi sarjana
pada Bagian Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum

disusun dan diajukan oleh :

LOLYTA ELISABETH LINTIN

B111 12 142

kepada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

PENGESAHAN SKRIPSI

Sistem Bagi Hasil Kande Tongkonan Dalam Lembang Tumbang Datu Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja

Disusun dan diajukan Oleh

LOLYTA ELISABETH LINTIN

B111 12 142

Telah Dipertahankan Di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Jumat, 3 JUNI 2016
Dan Dinyatakan Diterima

Ketua,

Panitia Ujian :

Sekretaris,

Prof. Dr. A. Suryaman M.P., S.H., M.H
Nip. 19690727 199802 2 001

H. M. Ramli Rahim, S.H., M.H
Nip. 19530727 198103 1 007

A.n, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H
Nip. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : LOLYTA ELISABETH LINTIN

Nim : B111 12 142

Bagian : HUKUM PERDATA

Judul : Sistem Bagi Hasil Kande Tongkonan Dalam Lembang
Tumbang Datu Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten
Tana Toraja.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Mei 2016

PEMBIMBING I


Prof. Dr. A. Suryaman, M. Pide., S.H., M.H
Nip. 19690727 199902 2 001

PEMBIMBING II


H.M. Ramli Rahim, S.H., M.H
Nip. 19530727 198103 1 007



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: LOLYTA E LINTIN
Nomor Pokok	: B11112142
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Sistem Bagi Hasil Kande Tongkonan Dalam lembang Tumbang Datu Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.



Makassar, Mei 2016

Dekan

Dekan I

Prof. Dr. Ahmadi Mirza, SH., MH
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

Lolyta Elisabeth Lintin (B111 12 142) Sistem Bagi Hasil Kande Tongkonan Dalam Lembang Tumbang Datu Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja. Di bawah bimbingan **Andi Suryaman M. Pide** sebagai pembimbing I dan **Ramli Rahim** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil tanah adat tongkonan dalam Lembang Tumbang Datu Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja dan untuk mengetahui peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa bagi hasil di Lembang Tumbang Datu Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja yang dikhususkan pada Lembang Tumbang Datu. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang terkait yaitu tokoh masyarakat, To Parengnge', sekretaris camat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bagi hasil yang dilakukan masyarakat adat Toraja dilaksanakan dalam bentuk lisan serta kebiasaan dari *aluk todolo*. Bagi hasil yang terjadi hanya berlaku untuk tanah basah sedangkan untuk tanah kering hasilnya hanya dapat dinikmati bersama. Pelaksanaan bagi hasil di Tana Toraja dilakukan dengan sistem penggarapan bergilir (*disitaunni*) serta adanya kesepakatan keluarga dimana penggarap sendiri berasal dari tongkonan dengan pembagiannya ada 2 macam yaitu untuk dibagi 2 dimana pemilik dan penggarap memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk dibagi 3 dimana pemilik memperoleh $\frac{1}{4}$ (*sangtepo*) dan penggarap $\frac{3}{4}$ (*pa'tesan*) (2) Bentuk penyelesaian sengketa bagi hasil *kande tongkonan* oleh lembaga adat di Kabupaten Tana Toraja khususnya dalam Lembang Tumbang Datu adalah melalui upaya musyawarah kekeluargaan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan mendamaikan para pihak yang bersengketa.

KATA PENGANTAR

Tiada kata lain yang lebih indah untuk penulis ucapkan selain puji syukur dan sembah kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, kasih, dan penyertaanNya yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “**Sistem Bagi Hasil Kande Tongkonan Dalam Lembang Tumbang Datu Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja**” dalam rangka penyelesaian program studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, dengan hormat dan dengan segenap ketulusan serta kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Yunus Bunga’ Lintin dan Ibunda Theresia Gareso atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama ini dalam membesarkan dan mendidik penulis serta selalu mendoakan yang terbaik untuk keberhasilan penulis. Terima kasih pula buat kedua saudaraku kakak dan adikku Stelly Angelina Lintin dan Christin Refiensi Lintin yang selalu menghadirkan canda tawa dalam kehidupan penulis.

Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Prof. Dr. Andi Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I dan Bapak H. M. Ramli Rahim, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang di tengah kesibukan dan aktifitasnya senantiasa bersedia membimbing, dan mengarahkan penulis

dalam penyusunan skripsi ini. Dewan penguji, Bapak Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.H., Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan beserta saran-saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam proses tugas akhir ini banyak pihak yang membantu penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan, oleh karena itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UNHAS, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palabuhu, MA.
2. Dekan Fakultas Hukum UNHAS Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
3. Pembantu Dekan I Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H, Pembantu Dekan II Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, dan Pembantu Dekan III Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.
4. Dosen Pembimbing Akademik (PA), Bapak Dr. Ansori Ilyas, S.H., M.H., dan Ibu Marwah, S.H., M.H., yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis secara pribadi.
5. Ketua Bagian dan Sekretaris Bagian Hukum Perdata beserta seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga penulis dapat menyelesaikan studi.

6. Para Staf Administrasi dan Staf Bagian Perpustakaan di lingkungan Akademik Fakultas Hukum Unhas serta Staf Perpustakaan Pusat Unhas yang telah banyak memberikan bantuan
7. Kepala Kantor Kesbang, Politik, dan Linmas Kabupaten Tana Toraja beserta jajarannya yang mengizinkan untuk meneliti di wilayah Tana Toraja.
8. Para Camat, Lurah, dan Kepala Lembang di Kabupaten Tana Toraja beserta seluruh staf dan jajarannya, terima kasih atas segala informasi, masukan, saran, dan motivasi selama penulis melakukan penelitian.
9. Para hakim adat, pemangku adat (To Parengé'), dan tokoh-tokoh masyarakat, terima kasih karena telah berbagi pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
10. Bapak Usman, Bapak Ronny, Bapak Ramalang, Bapak Dullah, Bapak Hakim, Ibu Rahma, Kak Lina, Kak Tri terima kasih untuk kebaikan dan bantuan yang diberikan selama proses awal pengurusan kuliah hingga skripsi ini selesai dengan baik. Kalian luar biasa.
11. Keluarga besar dari Ayah dan Ibu Penulis, yang tak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
12. Florencia Ria Pariambo, S.H sebagai kakak rohani, terima kasih telah memberikan pelajaran hidup, yang senantiasa berbagi kekuatan dan menopang penulis dalam melalui hari-hari yang sulit.

13. Kak Oktavianus Patiung, S.H., M.H, Kak Siprianus Trisno S.H, Kak Rhony Andrhes Linthin, S.H, Kak Mulia Susanna Karaeng, S.H, Kak Siti Hardiyanti Akbar, S.H, atas bantuan dan pengetahuan yang bersedia di bagikan kepada penulis.
14. Terima kasih kepada saudara Tarongko Ranteallo, dan Ryan Ranteallo telah menjadi sahabat, teman, saudara yang selalu mendukung, menghadirkan canda, tawa, dan selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis. Dan juga untuk Tante Mama Tarongko yang selalu mendukung dan mengingatkan penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
15. My best friend, my family, yang terkasih, Susanto Santiago Pararuk S.H, Wiwik Meilaraty Saloko S.H, Destri Kristianti Parubang S.H, Cheryanti Imma Narpa, Dian Martin, Resty Gloria Pasomba, Aprilya Paskalina Wair Pangarungan, Sisdiaty Lifenty Tangdilintin. Terima kasih karena telah dan tetap menjadi rekan dan sahabat seperjuangan selama ini.
16. Terima kasih untuk teman-teman PMK FH-UH 12 Amita Kalasuso S.H., Winda Budiarti Pakambanan S.H., Aldy, Yudi, Giovani, Fantari, Bill, Richard, Clarissa, Tania Gabriella Ciutarno S.H., Novita Cherryl S.H., serta teman-teman Angkatan Petikum 2012 yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu dan juga Rae Netha Junaedy S.H., Helvira Mayasari S.H. Terima kasih atas bantuan, kerja sama dan kebersamaan yang telah dilalui selama masa perkuliahan.

17. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (PMK FH-UH), Kak Guntur, Intan Karangan S.H., Trigita Tiku Padang S.H., Shella P. Tehusalawany S.H., Jhon Rerung Allo, Kak Cesar, Kak Vengky, Kak Agung, Kak Ato, Dewina, Mely, Nelson Sirenden, Ucok, Dikson, Aldo, Kevin, Vian, Natalia, Nefrit, Yolan, Stanza. Terima kasih atas canda, tawa, saling berbagi beban berat pelayanan, persaudaraan dan kekeluargaan dari kalian. Tetap semangat dan rendah hati dalam melayani, God bless.

18. Terima kasih untuk teman – teman Alumni SMA Katolik Rajawali, Yuko Naomi S.H., Natalia Rustam S.H., Jequiline, Williana Tan, Cindy Novell, Diana Gosal, Kino, Sieny, Siska, Tjiang, Paula, Thesman, Tata, Ivan, dan Indri Liem yang telah memberi semangat dan mendukung penulis dalam mengerjakan tugas akhir. I Miss You~

19. Teman-teman KKN reguler angkatan 90 Kabupaten Bulukumba Kecamatan Rilau Ale khususnya desa Bontoharu, Chris, Kak Frank, Kak Budi, Lala, dan Rifa atas kebersamaan dan kerjasamanya selama KKN.

20. Seluruh pihak yang telah banyak membantu, terima kasih banyak atas doa dan bantuannya selama Penulis menyelesaikan studi dan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis sangat menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis dengan tulus hati, lapang dada dan

tangan terbuka menerima segala kritikan yang bermanfaat untuk melengkapi segala kekurangan yang ada. Besar harapan penulis kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca serta dalam penulisan-penulisan selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Makassar, Mei 2016

PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Mengenai Tanah	7
1. Pengertian Tanah.....	7
a. Tanah Negara.....	10
b. Tanah Adat	13
2. Perlindungan Hukum Nasional Terhadap Hak Ulayat.....	20
3. Transaksi-transaksi Yang Berhubungan Dengan Tanah.....	23
B. Tinjauan Terhadap Tongkonan	25
C. Lembaga Adat.....	32
1. Pengertian Lembaga Adat	32
2. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Adat	34
3. Peran dan Wewenang Lembaga Adat	35
D. Sistem Bagi Hasil Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960	37

1. Pengertian Bagi Hasil	37
2. Subyek Perjanjian Bagi Hasil Pertanian.....	37
3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil.....	37
4. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil	38
5. Besarnya Pembagian Hasil Tanah Dalam Perjanjian Bagi Hasil.....	39
6. Kewajiban Pemilik dan Penggarap dalam Perjanjian Bagi Hasil.....	40
7. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Lokasi Penelitian	41
B. Jenis dan Sumber Data	41
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Wilayah Tana Toraja.....	43
B. Latar Belakang Lembang Tumbang Datu.....	48
C. Sistem Bagi Hasil Kande Tongkonan Dalam Lembang Tumbang Datu Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja.....	49
D. Peran Lembaga Adat Tongkonan Dalam Penyelesaian Sengketa Bagi Hasil Kande Tongkonan.....	60
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keanekaragaman kondisi sosial masyarakat yang merujuk pada suatu kelompok sosial dalam masyarakat. Suatu kelompok sosial terbentuk karena adanya kesadaran bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat adanya kesamaan kepentingan serta kesamaan pendapat dapat menjadi faktor pembentuk kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat kemajemukan masyarakatnya menciptakan kehidupan yang beragam dari satu daerah dengan daerah yang lain, yang kemudian menjadi pembeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Keberagaman kehidupan tersebut sebagai cerminan dari perbedaan perilaku dan pola kehidupan yang didasarkan pada kebiasaan dan faktor lain dari lingkungan serta kepercayaan di suatu daerah tertentu.

Salah satu dari sekian keberagaman masyarakat tersebut adalah mengenai kehidupan yang didasarkan pada sistem kepercayaan dan kebiasaan yang dianutnya. Kemudian dari sistem kepercayaan dan kebiasaan tersebut yang kemudian diartikan sebagai adat dalam suatu masyarakat dan menjadi dasar dari segala segi kehidupan masyarakatnya.

Adat tersebut yang kemudian menjadi hukum yang mengatur perilaku dan pola kehidupan masyarakat di dalamnya. Sebagai suatu hukum yang berlaku di masyarakat, adat memiliki susunan, struktur dan nilai-nilai yang mengatur.

Berkaitan dengan kebudayaan, masyarakat Tana Toraja merupakan salah satu daerah dimana masyarakatnya masih memegang teguh nilai-nilai kebudayaan dan adat istiadat. Hukum adat yang menjadi pedoman diyakini dan dianut oleh masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Demikian pula halnya dalam menyelesaikan suatu masalah, masyarakat melakukan musyawarah untuk membicarakan masalah tersebut secara kekeluargaan sehingga masalah dapat diselesaikan secara damai. Musyawarah dilakukan baik terbatas dalam lingkungan keluarga sendiri atau bila dipandang perlu dimusyawarahkan dalam musyawarah perdamaian adat yang disaksikan oleh suatu lembaga adat.

Pada dasarnya setiap daerah memiliki Lembaga Adat tersendiri yang didasari oleh nilai, norma adat-istiadat yang masih dianut oleh masyarakat yang ada di dalamnya, selain untuk menjaga nilai budaya, setiap Lembaga Adat juga memiliki fungsi tersendiri dalam pelaksanaannya termasuk mengenai pemanfaatan beserta transaksi tanah yang menjadi kebiasaan dari sebuah masyarakat adat.

Tanah erat sekali hubungannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia seperti yang ada di Tana Toraja. Pada masyarakat adat Tana Toraja transaksi tanah merupakan salah satu jenis kegiatan yang sangat erat

hubungannya dengan masyarakat, karena hampir sebagian besar aktivitas dan sumber kehidupan masyarakat mengandalkan sumber daya pertanahan, mengingat mata pencaharian terbesar masyarakat adat Tana Toraja adalah petani yang menggantungkan hidup pada pengelolaan tanah. Selain itu, dalam adat istiadat masyarakat Toraja tanah sangat berperan penting dalam pelaksanaan upacara adat kematian (*Rambu Solo'*) dan upacara ungkapan syukur/suka cita (*Rambu Tuka*) seperti acara pernikahan, syukuran panen, dan peresmian rumah adat/ tongkonan yang baru atau yang selesai di renovasi, dimana tanah digunakan sebagai objek untuk melangsungkan upacara tersebut. Tanah juga erat kaitannya dengan pengadaan rumah adat Tongkonan beserta kuburan (*liang*) sekaligus berfungsi menyatukan suatu rumpun keluarga. Maka dari itu, tanah merupakan salah satu sektor pendukung kehidupan masyarakat adat Toraja yang sangat penting.

Berbicara tentang pemanfaatan tanah dalam masyarakat erat kaitannya dengan transaksi tanah. Salah satu transaksi yang sering dilakukan berkaitan dengan tanah yaitu sistem pengelolaan tanah dengan sistem bagi hasil. Pada umumnya transaksi ini dilakukan apabila pemilik tanah tidak mampu atau tidak ingin mengelola tanah miliknya dan menggunakan jasa orang lain untuk mengelola secara optimal tanah tersebut, yang selanjutnya dilakukan pembagian atas hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah antara pemilik dengan pengelola tanah tersebut.

Dalam bagi hasil, bukan tanah yang menjadi tujuan utamanya, akan tetapi mengenai pekerjaan dan hasil dari tanah tersebut. Objek dari bagi hasil sawah ini adalah hasil dari tanah tersebut, juga tenaga dari orang yang mengerjakannya, sedangkan subyek dari bagi hasil sawah adalah pemilik tanah dan penggarap sawah.

Sebagai salah satu transaksi yang dilakukan dalam lingkup masyarakat adat, transaksi tanah dengan sistem bagi hasil atas tanah tongkonan berupa hasil pertanian sawah dalam masyarakat adat Toraja masih pula dilakukan dan masih berlaku hingga saat ini. Transaksi ini dilakukan berdasarkan unsur rasa saling percaya serta kebiasaan dari ajaran *aluk todolo* sehingga perjanjian tersebut tidak tertulis. Tidak heran dalam penerapannya akan berbeda dari apa yang tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 karena adat lebih berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Dalam pelaksanaan bagi hasil di setiap daerah tentu memiliki cara tersendiri. Khususnya di Toraja yang menjadi pembeda dengan bagi hasil pada umumnya yakni adanya bagian hasil (*talitak*) tersebut disimpan untuk tongkonan. Selain itu melibatkan peran lembaga adat atau yang dikenal dengan istilah *To Parengnge'* dalam hal apabila terjadi sengketa di dalamnya.

Secara umum bentuk bagi hasil dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 dibuat dalam bentuk tertulis dihadapan Kepala Desa, serta disaksikan oleh dua saksi masing-masing dari pihak penggarap dan pemilik tanah dan wajib

disahkan oleh Kepala Kecamatan. Besarnya pembagian hasil tanah yaitu hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap daerah ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat. Untuk jangka waktu bagi hasil yaitu sekurang-kurangnya tiga tahun bagi sawah dan sekurang-kurangnya lima tahun untuk tanah kering.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem bagi hasil kande Tongkonan dalam Lembang Tumbang Datu Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja?
2. Bagaimana peran lembaga adat Tongkonan dalam menyelesaikan sengketa bagi hasil kande Tongkonan di Lembang Tumbang Datu Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil kande Tongkonan dalam Lembang Tumbang Datu Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja.
2. Untuk mengetahui peran lembaga adat Tongkonan dalam menyelesaikan sengketa bagi hasil kande tongkonan di Lembang

Tumbang Datu Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk dapat menjadi bahan referensi dalam pengembangan penerapan ilmu hukum keperdataan khususnya dibidang hukum agraria dan hukum adat yang berkaitan dengan bagi hasil tanah adat Tongkonan.
2. Untuk menjadi bahan bacaan bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara mendalam mengenai sistem bagi hasil tanah adat Tongkonan.
3. Untuk menambah dan memperluas cakawala penulis sendiri, khususnya mengenai hal tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tanah

1. Pengertian Tanah

Tanah merupakan hal yang bersifat tetap serta memiliki nilai pendapatan dan penghasilan, oleh karena itu ia berharga. Barang siapa yang menguasai tanah tersebut, juga menguasai potensi modal yang menguntungkan karena tanah merupakan nilai yang sangat strategis.

Sebutan tanah dapat diartikan dalam berbagai makna tergantung pada penggunaannya. Karenanya perlu ada batasan agar dapat diketahui untuk apa istilah tersebut di gunakan.

Menurut KBBI tanah diartikan sebagai:

- a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali
- b. Keadaan bumi di suatu tempat
- c. Permukaan bumi yang diberi batas
- d. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya)

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Makna dari permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum. Hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat

diatasnya merupakan persoalan hukum. Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berhubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat di atasnya.¹

Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA dinyatakan, sebagai berikut:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam atas hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain maupun badan hukum.

Jelas bahwa dalam pengertian yuridis tanah adalah permukaan bumi sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Sedangkan ruang dalam pengertian yuridis, yang berbatas, berdimensi tiga, yaitu panjang, lebar, dan tinggi.²

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi.³

UUPA menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam agraria meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.

¹ Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika., Jakarta, hlm 3.

² Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana., Jakarta, hlm.10.

³ Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya, jilid 1 Hukum Agraria Nasional*, Djambatan., Jakarta, hlm 18.

Pengertian bumi dalam Pasal 1 ayat 4 jo Pasal 4 ayat 1 meliputi permukaan bumi (yang disebut tanah), tubuh bumi di bawahnya serta berada di bawah air.

Dengan demikian, sebagaimana telah dikemukakan di atas, tanah dikualifikasikan sebagai “permukaan bumi”, sedangkan dalam pengertian “bumi” itu termasuk pula “tanah dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air”. Penguasaan permukaan bumi atau tanah tersebut tidak termasuk tanah yang ada di bawah permukaan bumi. Tetapi benda-benda atau kekayaan alam yang terkandung di bawah permukaan bumi (tanah) di kuasai oleh negara.⁴

Menurut Effendi Perangin bahwa:

“Tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkret”.⁵

Imam Sudiyat menjelaskan bahwa:

“Sebagai pengertian geologis-agronomis, tanah ialah lapisan lepas permukaan bumi yang paling atas. Yang dimanfaatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan disebut tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian, tanah perkebunan. Sedangkan yang digunakan untuk mendirikan bangunan disebut tanah bangunan. Di dalam tanah garapan itu dari atas kebawah berturut-turut terdapat sisiran garapan sedalam irisan bajak, lapisan pembentukan humus dan lapisan dalam”

⁴ Aminuddin Salle, dkk, 2010, *Hukum Agraria*, Aspublishing Makassar., Makassar, hlm 13

⁵ Effendi Perangin, 1989, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali., Jakarta, hlm 195.

Menurut Jhon Salindeo bahwa:

“Tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis, sekaligus magis religiokismis menurut pandangan hukum Indonesia. Dalam hal ini tanah diartikan sebagai kulit bumi, mempunyai hubungan erat dengan bangsa Indonesia, karena tanah dianggap sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa”.⁶

Berdasarkan uraian pengertian tanah di atas, dapat memberikan pemahaman bahwa tanah mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi yang memberikan nilai tambah produksi sehingga menjadi kewajiban setiap orang untuk memelihara dan mempertahankannya.

a. Tanah Negara

Penggunaan istilah Tanah Negara bermula pada zaman Hindia Belanda. Sesuai dengan konsep hubungan antara penguasa dan tanah berupa hak kepemilikan. Menurut pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa:

“Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai atas sesuatu hak atas tanah”.

Tanah negara diartikan sebagai pemilik dalam arti kepunyaan atas tanah dapat ditemukan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebelum adanya amanah Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, tentang hak menguasai negara, negara pernah diartikan sebagai pemilik hak atas tanah yang dapat ditemukan pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

⁶ Skripsi Yoona Pongpabia, 2013, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Kepemilikan Tanah Tongkonan Di Daerah Tana Toraja (Studi Kasus Putusan No.34/Pdt.G/2008/PN.Mkl)*., Makassar, hlm 8.

Menurut pengertian Maria Sumardjono, Tanah negara adalah sebagai berikut:

“Tanah-tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, hak pengelolaan, serta tanah ulayat dan tanah wakaf”.

Adapun ruang lingkup tanah negara meliputi:

- a) Tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya;
- b) Tanah-tanah hak yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi;
- c) Tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris;
- d) Tanah-tanah yang diterlantarkan; dan
- e) Tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum sesuai dengan tata cara pencabutan hak yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1961 dan pengadaan tanah yang diatur dalam Keppres No. 55 Tahun 1993.

Pertama, tanah-tanah Negara yang disebut dengan Negara bebas yaitu tanah Negara yang benar-benar bebas artinya bahwa tanah tersebut belum ada atau belum pernah dilekati oleh sesuatu hak apapun. Pengertian hak disini harus diartikan yuridis yang diatur dalam ketentuan hukum barat (BW) termasuk di dalamnya hak rakyat atas tanah yang pada waktu itu tanah-tanah yang mendasarkan pada hukum adat setempat. Sepanjang tidak didaftarkan haknya dengan cara

menundukkan diri secara sukarela kepada hukum barat maka tanah yang dikuasa rakyat merupakan bagian dari atau berstatus sebagai tanah negara yang diistilahkan sebagai tanah negara yang diduduki oleh rakyat.⁷

Dalam perkembangannya sebutan tanah negara bebas ini dibedakan menjadi dua oleh pemerintah Hindia Belanda. Pertama tanah negara bebas, tanah negara bebas terbagi atas dua yaitu:

- a) Tanah-tanah menjadi tanah negara bebas karena dibebaskan dari hak-hak milik rakyat oleh suatu instansi/departemen yang membebaskannya.
- b) Tanah negara bebas yang tidak ada penguasaannya secara nyata diserahkan kepada suatu departemen, dianggap bahwa tanah tersebut dimasukkan kedalam penguasaan Departemen Dalam Negeri.

Kedua, tanah negara yang tidak bebas yaitu tanah negara yang di atasnya ada hak-hak rakyat atas tanah atau tanah yang dikuasai atau diduduki oleh rakyat berdasarkan pada hukum adat mereka (hak ulayat masyarakat hukum adat).

Setelah kemerdekaan, sebelum terbitnya UU no.5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pengertian Tanah Negara ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Dalam PP tersebut tanah

⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

negara dimaknai sebagai “tanah yang dikuasai penuh oleh negara”. Inti dari pengertian tanah negara ditegaskan bukan dikuasai penuh akan tetapi merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara (penjelasan umum II (2) UUPA 1960), artinya negara bukan sebagai pemilik tanah, tetapi negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang bertindak selaku badan penguasa, yang diberikan wewenang oleh rakyat untuk:

- a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya.
- b) Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyainya atas (bagian) bumi, air dan ruang angkasa itu.
- c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.⁸

b. Tanah Adat

Tanah adat merupakan tanah milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dahulu. Mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, di Indonesia masih berlaku dua

⁸ K. Wantjik Saleh, 1982, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia., Jakarta, hlm. 13.

macam hukum yang menjadi dasar bagi hukum pertanahan yaitu hukum adat dan hukum barat. Sehingga ada 2 macam tanah yang kita kenal, yaitu “Tanah Adat” atau biasa juga disebut “Tanah Indonesia” dan “Tanah Barat” yang biasa juga disebut “Tanah Eropa”.⁹

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka yang dikategorikan Tanah Adat adalah tanah yang dibuka sebelum tanggal 24 September 1960 yaitu saat diundangkannya UUPA, dikerjakan secara terus-menerus, tidak terlanter sehingga tanah dan/atau tanaman yang ada di atasnya terawat dengan baik.

Tanah dalam hukum adat dijadikan dasar pembentukan hukum agraria nasional dan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam pembentukan hukum agraria.

Hukum adat dalam pembentukan hukum agraria nasional berkedudukan sebagai dasar dan pelengkap. Pembangunan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional menghadapi kesulitan-kesulitan tertentu. Kesulitan tersebut berkaitan dengan sifat pluralitas dari hukum adat itu sendiri, masing-masing masyarakat hukum adat mempunyai adatnya sendiri yang berbeda-beda. Untuk itu perlu dicari persamaannya.¹⁰

Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali,

⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁰ Muchsin, dkk. 2010, *Hukum Agraria Indonesia, Dalam Perspektif Sejarah*, Refika Aditama., Bandung, hlm. 67.

yakni hubungan yang bersifat religio-magis. Hubungan ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, atau berburu binatang-binatang yang hidup di atas tanah itu. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat.¹¹

Hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak ulayat yang mengandung 2 unsur yang beraspek hukum keperdataan dan hukum publik. Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang diyakini sebagai karunia suatu peninggalan nenek moyang kepada kelompok masyarakat hukum adat.

Berkaitan dengan hak ulayat tersebut, dalam Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa:

“dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Pada dasarnya hak ulayat tidak akan didaftar namun diakui oleh UUPA dengan 2 syarat yaitu mengenai “eksistensinya” dan mengenai “pelaksanaannya”. UUPA tidak memerintahkan pendaftarannya, dan dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

¹¹ Bushar Muhammad, 2006, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita., Jakarta, hlm 103.

Tanah, hak ulayat tidak dimasukkan dalam golongan objek pendaftaran tanah.¹²

Di lingkungan hukum adat, campur tangan penguasa yang berkompeten dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, berpindah dan berakhirnya hak milik atas tanah dilakukan oleh kepala persekutuan hukum, seperti kepala atau pengurus desa. Jadi, jika timbul permasalahan yang berkaitan dengan tanah adat ini, maka pengurus-pengurus yang telah ada itulah yang akan menyelesaikannya.¹³

Dari ketentuan-ketentuan hukum tanah akan timbul hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan hak-hak yang ada. Dua macam hak yang timbul atas tanah, antara lain yaitu:

- 1) Hak Persekutuan, yaitu hak yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, dinikmati dan diusahai oleh sekelompok manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu yang disebut dengan masyarakat hukum (persekutuan hukum). Hak persekutuan ini sering disebut dengan hak ulayat, hak dipertuan, hak purba, hak komunal atau *beschikingsrecht*.
- 2) Hak Perseorangan, yaitu hak yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, dinikmati dan diusahai oleh seseorang anggota dari persekutuan tertentu.

¹² Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan., Jakarta, hlm. 193.

¹³ Skripsi Yoona Pongpabia, 2013, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Kepemilikan Tanah Tongkonan Di Daerah Tana Toraja (Studi Kasus Putusan No.34/Pdt.G/2008/PN.Mkl)*. Makassar, hlm .13.

Hukum tanah adat dalam hal hak persekutuan atau hak pertuanan dapat dilihat jelas bahwa umat manusia itu ada yang berdiam di suatu pusat tempat kediaman yang selanjutnya disebut masyarakat desa atau mereka ada yang berdiam secara tersebar di pusat-pusat kediaman yang sama nilainya satu sama lain, di suatu wilayah yang terbatas, maka dalam hal ini merupakan suatu masyarakat wilayah.

Adapun hak-hak perseorangan yang diberikan atas tanah ataupun isi tanah ulayat, yaitu:¹⁴

1. Hak Milik Atas Tanah

Hak milik atas tanah adalah hak yang dimiliki setiap anggota ulayat untuk bertindak atas kekuasaanya atas tanah ataupun isi dari lingkungan atau wilayah ulayat. Hak milik atas tanah terdiri dari hak milik terikat dan hak milik tidak terikat. Yang dimaksud hak milik terikat adalah semua hak milik yang dibatasi oleh hak-hak lain yang terdapat dalam lingkungan masyarakat adat seperti hak milik komunal atas tanah dimana sebidang tanah menjadi milik bersama dari penduduk desa. Sedangkan yang dimaksud dengan hak milik tidak terikat adalah hak milik dari perseorangan yang tidak ada campur tangan dari pihak desa.

¹⁴ Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia - Suatu Pengantar*, Rafika Aditama., Bandung, hlm 86.

2. Hak Menikmati Atas Tanah

Hak menikmati atas tanah (*Genotrecht*) mengandung arti bahwa hak yang diberikan kepada seseorang merupakan haknya untuk menikmati hasil tanah berupa memungut hasil panen tidak lebih dari satu kali saja. Sebenarnya hak ini biasa diberikan kepada orang luar lingkungan ulayat yang diizinkan untuk membuka sebidang tanah dalam lingkungan ulayat, setelah panen selesai, tanah harus dikembalikan kepada hak ulayat.

3. Hak Terdahulu

Tentang hak terdahulu (*voorkeursrecht*) adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk mengusahakan tanah itu, dimana orang tersebut didahulukan dari orang lain. Ini dapat terjadi misalnya tentang sebidang tanah belukar yang merupakan tanah dari ulayat atau berupa tanah ulayat.

4. Hak Terdahulu Untuk Beli

Begitu pula untuk hak terdahulu untuk beli, dimana seseorang memperoleh hak sebidang tanah dengan mengesampingkan orang lain. Hak ini sering disebut hak wenang beli dan hal ini dapat terjadi karena pembeli adalah sanak saudara si penjual, anggota masyarakat atau ulayatnya, tetangga dari si penjual itu sendiri.

5. Hak Memungut Hasil Karena Jabatan

Mengenai hak memungut hasil karena jabatan (*ambtelijk profijtrecht*) bisa terjadi karena seseorang sedang menjadi pengurus masyarakat, dan hak ini ia peroleh selama menduduki jabatan itu, setelah tidak menduduki jabatannya maka hak itu tidak diberikan lagi kepadanya.

6. Hak Pakai

Hak Pakai (*gebruiksrecht*) adalah hak atas tanah yang diberikan pada seseorang atau kelompok untuk menggunakan tanah atau memungut hasil dari tanah tersebut.

7. Hak Gadai dan Sewa

Hak gadai dan hak sewa dalam hubungan ini timbul karena adanya satu ikatan perjanjian antara kedua belah pihak atas tanah tersebut. Selama belum ditebus oleh pemilik tanah, maka selama itu pua hak atas tanah menjadi hak milik yang memberi gadai, begitu pula tentang hak sewa, bahwa hak milik itu berlangsung hingga putusnya perjanjian sewa-menyewa atas tanah itu.

2. Perlindungan Hukum Nasional Terhadap Hak Ulayat

Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat tercantum dalam Pasal 3 UUPA.

Disebutnya hak ulayat dalam UUPA yang pada hakikatnya pengakuan itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan.¹⁵

Selain dalam UUPA, sebagai dasar hukum atas hak ulayat pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaan hukum tanah nasional, yaitu Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan tersebut untuk menjawab kenyataan bahwa banyak hak ulayat dari masyarakat hukum yang tidak mendapat pengakuan dari Negara.

Selain itu peraturan tersebut memuat kebijaksanaan yang menjelaskan prinsip pengakuan terhadap “hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 UUPA. Kebijakan tersebut meliputi:¹⁶

¹⁵ Aminuddin Sale, dkk, hlm.75

¹⁶ A. Suryaman M.Pide, 2014, *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Kencana., Jakarta, hlm. 120.

- 1) Penyamaan persepsi mengenai “hak ulayat”
- 2) Kriteria dan penentuan masih eksisnya hak ulayat dan hak yang serupa dari masyarakat hukum adat
- 3) Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya

Dalam peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999, pada Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat masih ada apabila memenuhi tiga syarat:¹⁷

- 1) Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidup sehari-hari.
- 3) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengelolaan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan hukum tersebut.

Selain ketiga kriteria yang harus terpenuhi tersebut, untuk menentukan ada atau tidaknya hak ulayat, Pemerintah Daerah harus

¹⁷ *Ibid*, hlm. 121.

melakukan penelitian dengan melibatkan pakar hukum adat, tokoh adat, aparat pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat.

Salah satu lingkup hak ulayat adalah tanah, yang disebut tanah ulayat. Tanah ulayat menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari masyarakat adat tertentu.

Namun yang perlu diperhatikan adalah tidak dapat dibenarkan jika suatu masyarakat hukum adat berdasarkan hak ulayatnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek dalam rangka penambahan penduduk dan pembangunan nasional. Seringkali, pembangunan daerah terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulayat. Kepentingan suatu masyarakat hukum, harus mengutamakan kepentingan nasional dan negara yang lebih luas.

Karena itu, adanya keharmonisan dan sikap yang saling sinergis antar kepentingan nasional dan pengakuan akan hak ulayat tersebut sangatlah penting. Bagaimanapun, kepentingan negara harus diletakkan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Namun, sebisa mungkin kepentingan negara tersebut tidak pula mengabaikan kepentingan individu yang bersangkutan.

3. Transaksi-transaksi Yang Berhubungan Dengan Tanah

Berbeda dengan transaksi tanah, dalam transaksi menyangkut tanah objeknya bukan tanah, tetapi hanya mempunyai hubungan dengan tanah. Dalam transaksi menyangkut tanah yang diperjanjikan adalah kekaryaannya, pengolahannya, atau dijadikan jaminan. Tanah tidak beralih atau berpindah tangan dari pemilik tanah kepada pihak lain dalam perjanjian ini, tetapi pemilik tanah memberi kesempatan untuk mengerjakan, menanam, memungut hasil, menikmati tanah kepada pihak lain baik dalam bentuk tolong-menolong maupun sebagai jaminan atas pemakaian uang. Dengan demikian, transaksi menyangkut tanah mempunyai arti tanah hanya berkaitan dengan perjanjian.

Dalam adat dikenal transaksi-transaksi yang ada hubungannya dengan tanah yang berikut:¹⁸

a. Transaksi *Memperdua*

Transaksi ini terjadi apabila pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat izin itu harus memberikan sebagian hasil tanahnya kepada pemilik tanah.

Dasar dari transaksi ini adalah pemilik tanah ingin memungut hasil dari tanahnya atau ingin memanfaatkan tanahnya, tetapi ia tidak ingin atau tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya itu. Misalnya A memiliki sebidang tanah, ia ingin menarik penghasilan

¹⁸ A. Suriyaman M. Pide, 2014, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana., Jakarta, hlm. 148.

dari tanah itu, tetapi tidak ingin atau tidak dapat mengerjakan sendiri. Ia mengadakan perjanjian dengan B, yang dimaksudnya memberi izin kepada B untuk mengerjakan, menanam, dan memungut hasil dari tanahnya disertai dengan ketentuan bahwa sebagian dari hasil ini harus di serahkan kepada A.

Fungsi dari transaksi ini ialah hak milik atas tanah dijadikan produktif, tanpa bekerja sendiri. Transaksi ini pada umumnya mulai berlaku pada saat menanam dan berakhir setelah panen. Objeknya bukan tanah, tetapi tenaga dan tanaman. Maka dari itu pemangku adat tidak perlu mengesahkan perjanjian ini, karena surat perjanjian-perjanjian jarang dibuat. Pada umumnya yang mengerjakan tanah akan mendapatkan separuh dari penghasilan dan penggarap tanah tidak dapat menangih selama ia masih diperbolehkan mengerjakan tanah yang bersangkutan.

b. Sewa

Sewa adalah suatu transaksi yang mengijinkan orang lain untuk mengerjakan tanahnya atau untuk tinggal di tanahnya dengan membayar uang sewa yang tetap sesudah tiap panen atau sesudah tiap bulan atau tiap tahun.

Apabila pada transaksi sewa ini oleh penyewa dibayarkan uang muka, maka transaksi ini sangat menyerupai jual tahunan atau jual *oyodan*.

c. Tanggungan

Transaksi macam ini terjadi apabila seseorang yang berutang kepada orang lain berjanji kepada yang memberi pinjaman tadi, bahwa ia selama belum melunasi hutangnya tidak akan mengadakan transaksi tentang tanahnya, kecuali dengan pemberian hutang.

d. *Numpang*

Apabila seorang pemilik tanah yang bertempat tinggal di tanah itu memberi izin kepada orang lain untuk membuat rumah yang kemudian ditempati olehnya di atas tanah itu juga, maka terdapat suatu transaksi yang disebut *numpang*. Izin tersebut dapat ditarik kembali, jika pihak dari penumpang tidak ada alasan untuk pergi dengan membayar kerugian ongkos-ongkos pindah (tukon tali).

B. Tinjauan Terhadap Tongkonan

Istilah *Tongkonan* berasal dari Kabupaten Tana Toraja. Kata *tongkonan* itu, berarti berkumpul atau musyawarah. Bagi masyarakat Toraja, tongkonan adalah rumah tinggal sekaligus merupakan rumah adat dan pusat budaya, yang dimana merupakan warisan serta hak milik turun-temurun.

Dalam perkembangannya, tongkonan memiliki dua arti, yaitu sebutan untuk rumah adat kediaman pemangku adat dan sebutan bagi rumpun keluarga yang berasal dan/atau mendiami rumah adat tersebut

Tongkonan bukanlah nama satu bentuk bangunan, tetapi Tongkonan merupakan rangkaian dari sekelompok bangunan dimana didalamnya terdapat *Banua Sura'* (rumah yang diukir / rumah utama), *Alang Sura'* (lumbung yang diukir), *Lemba* (juga berfungsi sebagai lumbung namun tidak berukir) dan juga sering terdapat rumah panggung yang memiliki ruangan yang lebih luas, seperti yang banyak kita saksikan sekarang ini.¹⁹

Tongkonan mempunyai sifat yang mirip dengan hak ulayat. Perbedaan diantara keduanya adalah Hak ulayat merupakan hak persekutuan yang bersifat teritorial (berdasarkan lingkungan daerah) atas tanah di dalam wilayah kekuasaannya. Sedangkan tanah tongkonan adalah hak sekelompok masyarakat adat yang bersifat geneologis (berdasarkan ikatan darah).²⁰

Tanah tongkonan pada umumnya tidak mengenal adanya sertifikat. Penguasaannya dilakukan oleh keturunan yang bermukim di lokasi tanah tersebut. Setiap keturunan dari pemilik tanah tongkonan berhak untuk tinggal dan membangun di atas tanah tongkonan dengan syarat

¹⁹ <http://www.torajaparadise.com/2014/11/orang-toraja-dan-makna-tongkonan.html> diakses pada Kamis 21 Januari pukul 19:10 WITA.

²⁰ Skripsi Yoona Pongpabia, 2013, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Kepemilikan Tanah Tongkonan Di Daerah Tana Toraja (Studi Kasus Putusan No.34/Pdt.G/2008/PN.Mkl)*., Makassar, hlm. 18.

sepanjang mereka ikut berpartisipasi memelihara dan menjaga tanah milik keluarga tersebut.

Tanah yang ada di Toraja terbagi dalam 32 wilayah adat. Pada masa kekuasaan turunan Tangdilino dan Buen Manik, maka sejak itu Toraja (Tondok Lepongan Bulan Tana Matarik Allo) terpecah menjadi 3 (tiga) wilayah adat yang besar yaitu:²¹

- a) Wilayah/daerah bagian Timur-Utara, merupakan daerah adat yang dinamakan *Padang di-Ambe'* (*Padang*=daerah, *di-Ambe'*=dipimpin oleh Penguasa *Ambe'*) dan dinamakan daerah adat *Peka Amberan* dimana Penguasa Adatnya bergelar *Ambe'* atau *Sia-Ambe'* atau *Sia-Ambe' Pong*.
- b) Wilayah/daerah bagian Tengah-Selatan, merupakan daerah adat yang dinamakan *Padang di-Puangngi* (*di-Puangngi*=dipimpin oleh *Puang*) dan dinamakan daerah adat *Kapuangan* dimana Penguasa Adatnya bergelar *Puang*. Wilayah ini terdiri dari wilayah adat *Tallu Lembangna* (Makale, Sangalla', dan Mengkendek).
- c) Wilayah/daerah bagian Barat, merupakan daerah adat yang dinamakan *Padang di-Ma'dikai* (*di-Ma'dikai*= dipimpin oleh *Ma'dika*) dan dinamakan daerah adat *Padang Kama'dikaan* dimana Penguasa Adatnya bergelar *Ma'dika*.

²¹ L.T. Tangdilintin, 2014, *Toraja dan Kebudayaannya*, Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan, hlm. 17.

Di dalam wilayah adat tersebut, Tongkonan (rumah adat sekaligus sebagai pusat pemerintahan tempo dulu) yang menguasai tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya secara turun temurun.

Tanah *tongkonan* dibagi menjadi beberapa macam antara lain:

- a. Tanah kering atau tanah yang biasa disebut *Kombong Tongkonan* yaitu suatu wilayah tongkonan, yang dapat dimanfaatkan langsung oleh anggota tongkonan yang bersangkutan.
- b. Sawah *Tongkonan* yang lazim disebut *Kande Tongkonan* yaitu tanah dalam bentuk sawah yang disiapkan untuk suatu tongkonan dimana hasil tanah tersebut di pergunakan bilamana rumah tongkonan tersebut mengalami kerusakan.
- c. *Rante Tongkonan* yaitu suatu tempat untuk melaksanakan pesta pemakaman dari anggota keluarga tongkonan apabila ada yang meninggal satu hal mana dilakukan berdasarkan kebiasaan di kalangan masyarakat toraja.
- d. Lingkungan *Tongkonan* yaitu berupa kuburan batu atau patane yang terletak di dalam wilayah tanah tongkonan yang bersangkutan yang merupakan tempat untuk menyimpan mayat dari anggota keluarga tongkonan yang telah diupacarakan.

Suatu tongkonan memiliki tanah-tanah sebagaimana yang telah disebutkan di atas, tergantung pada usia atau umur daripada tongkonan

itu sendiri sehingga ditinjau dari segi usia dan beberapa tingkatan sesuai peran dan fungsinya maka tongkonan dapat dibedakan dalam 3 macam yaitu:

1. *Tongkonan Layuk* (*tongkonan* pusat/*tongkonan* induk) yaitu rumah adat kediaman penguasa terdahulu tongkonan yang menjadi sumber pemerintahan dan kekuasaan yang telah mempunyai berlapis-lapis keturunan dimana menjadi tempat penyebaran adat-istiadat serta *aluk* (agama) yang diyakini dan di pedomani oleh seluruh masyarakat. *Tongkonan* ini berada dalam suatu wilayah yang meliputi beberapa lingkungan adat dan telah memiliki *kombong tongkonan*, sawah *tongkonan*, *rante tongkonan*, dan *liang tongkonan*. *Tongkonan* ini merupakan tempat berkedudukan para bangsawan yang disebut *Puang* dalam wilayah adat Tallu Lembangna (Makale, Mengkendek, Sangalla). *Tongkonan Layuk* disebut pula *tongkonan pesiuk aluk* (penyusunan aturan).
2. *Tongkonan* yaitu *Tongkonan* yang masih sangat muda usianya yang baru memiliki beberapa lapis keturunan, *Tongkonan* ini mungkin hanya mempunyai tanah kering atau sawah *tongkonan*, sedangkan *rante* dan *liang* tidak dimilikinya. Jadi dapat dikatakan bahwa tanah *tongkonan*

adalah tanah di sekitar wilayah tongkonan yang dimanfaatkan oleh setiap anggota keluarga Tongkonan.

3. *Tongkonan Batu A'riri* (*tongkonan muda*) yaitu rumah adat yang menjadi tempat berkumpul satu rumpun keluarga. *Banua Batu A'riri* hanya memiliki dua sampai tiga lapis keturunan dan tidak meliputi satu lingkungan adat. *Tongkonan* ini hanya sebagai tempat pembinaan warisan keluarga tetapi tidak mempunyai kekuasaan atau peranan adat.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, tanah tongkonan memiliki sifat yang tidak dapat dibagi-bagi karena telah dimiliki secara turun-temurun oleh beberapa lapis keturunan, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pembagian. Ketentuan tersebut berlaku terhadap jenis tanah tongkonan di atas, dengan pengecualian tanah *tongkonan Batu A'riri*. Pada tongkonan Batu A'riri, tanah tongkonan memang merupakan milik bersama satu rumpun keluarga, namun, apabila suatu saat ada kesepakatan dari semua anggota keluarga untuk membagi tanah tongkonan tersebut, maka hal itu mungkin dilakukan dengan pertimbangan bahwa tanah tongkonan tersebut mencukupi bagi semua anggota keluarga untuk mendapatkan bagiannya masing-masing.

Dalam hak persekutuan atas tanah tongkonan ditemukan ciri-ciri yang sama, yaitu sebagai berikut:

1. Tanah tongkonan hanya dapat dimiliki oleh anggota (keluarga) dari tongkonan yang bersangkutan dan menikmati hasil dari tanah tongkonan.
2. Tanah tongkonan tidak dapat dialihkan kepada pihak atau orang lain dengan maksud untuk memilikinya, akan tetapi orang luar hanya mempunyai hak untuk menggarap tanah tongkonan tersebut setelah mendapat izin dari pimpinan tongkonan dan setiap habis panen, penggarap tersebut harus menyerahkan sebagian dari hasil panen tersebut kepada pimpinan tongkonan tersebut
3. Jika tanah tongkonan diserahkan untuk sementara kepada orang lain untuk digarap, terlebih dahulu, harus mendapat izin dari pimpinan tongkonan dan setiap habis panen wajib menyerahkan sebagian hasil panen sebagai pembayaran atau masukan kepada pimpinan tongkonan atas kebaikan hatinya.

Sebagaimana adanya persamaan dengan hak ulayat maka tanah tongkonan juga mempunyai fungsi yaitu:

- a) Fungsi kedalam, artinya bahwa tanah tongkonan dapat dipakai oleh setiap warga masyarakat lingkungan persekutuan hukum/dalam kepentingan negara/pemerintahan.

- b) Fungsi keluar, artinya bahwa bila tanah itu diperlukan untuk kepentingan bersama dalam masyarakat wilayah persekutuan hukum/ dalam kepentingan negara/ pemerintah.

C. Lembaga Adat

1. Pengertian Lembaga Adat

Pengertian lembaga adat sangat erat kaitannya dengan pengertian adat itu sendiri. Secara umum, adat dapat diartikan sebagai peraturan yang berlaku pada sekelompok masyarakat tertentu atau beberapa kelompok yang bersumber dari satu keturunan yang sama dan mereka tidak terpisah-pisah.²²

Dalam Pasal 1 huruf (m) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintah Lembang, menyatakan bahwa:

“adat istiadat adalah seperangkat nilai/nilai atau kaidah-kaidah dan kepercayaan sosial, yang timbul sejak semula, bersama dengan pertumbuhan masyarakat lembang yang bersangkutan, dilaksanakan secara berulang-ulang dan terus menerus sepanjang masa”.

Menurut ilmu budaya, Lembaga Adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.

²² Abdul Harris Asy'arie, 2005, *Tinjauan Terhadap Hukum Adat Masyarakat Dayak Benuaq Kalimantan Timur*, Humas Pemprov Kaltim., Kalimantan Timur, hlm 51.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Sebagai wadah untuk melestarikan dan membantu menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan adat-istiadat dalam masyarakat adat, diperlukan adanya suatu lembaga adat. Sebutan untuk lembaga adat pada setiap wilayah adat berbeda-beda. Khususnya di Kabupaten Tana Toraja lembaga adat di pimpin oleh seorang pemangku adat yang disebut dengan *To Parengnge'*.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan pengertian lembaga adat yaitu ialah:

“lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh didalam sejarah kehidupan masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku”.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat yang mempunyai peran sangat penting dalam melestarikan dan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan adat dalam masyarakat.

2. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Adat

Keberadaan lembaga adat dalam komunitas masyarakat adat harus diakui dan diterima oleh seluruh anggota komunitas yang memungkinkan adat-istiadat serta tradisi semakin mapan serta tumbuh berkembang secara dinamis dalam menghadapi perubahan dari waktu ke waktu.²³

Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintah Lembang, menyatakan bahwa:

“kedudukan Lembaga Adat adalah merupakan wadah untuk menghimpun segala potensi adat istiadat yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat untuk digali dan dikembangkan”.

Lembaga adat di Kabupaten Tana Toraja juga memegang kendali dalam rangka pelaksanaan upacara adat. Masyarakat yang akan menyelenggarakan upacara-upacara adat, baik itu upacara kegembiraan (*Rambu Tuka*) maupun upacara adat (*Rambu Solo*), harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga adat setempat.

²³ B. Ter Haan Bzn, 2011, “Asas-asas dan Tatahan Hukum Adat”, Mandar Maju., Bandung, hlm 10.

Selain kedudukan, bersama dengan pemerintah lembaga adat juga berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:

- a) Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- b) Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.

3. Peran dan Wewenang Lembaga Adat

Lembaga Adat mempunyai peran yang sangat penting, dimana Lembaga Adat bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Lembaga Adat juga memiliki peran lain yaitu:²⁴

- a. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
- b. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya.
- c. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial dan keagamaan.

²⁴ www.sumbawakab.go.id/images/downloads/23._LEMBAGA_ADAT.doc kedudukan dan fungsi lembaga adat diaskes pada tanggal 9 Februari 2016 pukul 05.20 WITA.

- d. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.
- e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

Selain dari pada peran, Lembaga Adat juga memiliki wewenang yang meliputi:

- a. Mewakili masyarakat adat dalam urusan kepentingan masyarakat adat tersebut.
- b. Mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik.
- c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan.
- d. Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa adat.
- e. Sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa.
- f. Membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, kabupaten/kota desa adat tersebut berada.

D. Sistem Bagi Hasil Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

1. Pengertian Bagi Hasil

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil disebutkan bahwa:

“perjanjian bagi hasil ialah, perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

2. Subyek Perjanjian Bagi Hasil Pertanian

Subyek dari perjanjian bagi hasil adalah orang atau badan hukum. Secara umum subyek perjanjian bagi hasil petani penggarap dan pemilik dapat digolongkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yaitu:

a) Pemilik

ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.

b) Petani

ialah orang baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Setelah berlakunya UU No. 2 Thn 1960, maka bentuk perjanjian bagi hasil harus dibuat dalam bentuk tertulis dihadapan Kepala Desa, serta

disaksikan oleh dua saksi masing-masing dari pihak penggarap dan pemilik tanah dan wajib disahkan oleh Kepala Kecamatan.²⁵ Pembuatan perjanjian dihadapan Kepala Desa dan pengesahan oleh Kepala Kecamatan dimaksudkan agar pengawasan preventif dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.

4. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Jangka waktu perjanjian bagi hasil dalam UU No. 2 Thn. 1960 yaitu sekurang-kurangnya tiga tahun bagi sawah dan sekurang-kurangnya lima tahun untuk tanah kering. Pengakhiran perjanjian bagi hasil harus menunggu semua tanaman selesai dipanen. Maksudnya adalah bahwa penggarap diberikan tambahan waktu untuk panen asalkan tidak lebih dari satu tahun. Jika ada keraguan maka Kepala Desa yang memutuskan.²⁶

Pemindahan hak milik atas tanah kepada orang lain tidak menghapuskan perjanjian bagi hasil. Dengan beralihnya hak atas tanah, maka segala hak dan kewajiban pemilik hak atas tanah yang lama dalam perjanjian bagi hasil beralih kepada pemilik hak atas tanah yang baru. Jika penggarap meninggal dunia, maka segala perjanjian bagi hasil dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan hak dan kewajiban yang sama.²⁷

²⁵ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

²⁶ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

²⁷ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian hanya dapat dilakukan jika :²⁸

- a) Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada Kepala Desa;
- b) Dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, didalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan didalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3 UU No. 2 Thn 1960 atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain.

5. Besarnya Pembagian Hasil Tanah Dalam Perjanjian Bagi Hasil

Besarnya pembagian hasil tanah dalam UU No. 2 Thn. 1960 yaitu hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantra tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat. Keputusan mengenai penetapan pembagian hasil tanah yang diambil disampaikan kepada Badan Pemerintah Harian dan

²⁸ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II.²⁹

6. Kewajiban Pemilik dan Penggarap dalam Perjanjian Bagi Hasil

Dalam memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik yang dilakukan oleh penggarap kepada pemilik dengan melakukan pembayaran uang atau pemberian benda dalam bentuk apapun terhadap pemilik yang berakibat berkurangnya bagian pemilik dari hasil tanah termaksud dalam besarnya bagian hasil tanah dilarang.³⁰ Jika pemilik tanah yang sebenarnya adalah penggarap maka kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan tidak dibebankan kepada penggarap. Apabila jangka waktu berakhir maka penggarap wajib menyerahkan kembali tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik.

7. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil berakhir jika pemilik dan/atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam surat perjanjian yang telah disahkan oleh Camat dihadapan Kepala Desa. Apabila pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui perintah Kepala Desa maka hal ini diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

²⁹ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

³⁰ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan ini, maka penulis memilih lokasi di kabupaten Tana Toraja khususnya di Lembang Tumbang Datu, kecamatan Sangalla Utara dan di dalam masyarakat. Dipilihnya lokasi tersebut dengan pertimbangan, bahwa lokasi penelitian tersebut cukup tersedia data yang relevan dengan substansi permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis.

B. Jenis Dan Sumber Penelitian

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan dengan wawancara langsung kepada tokoh-tokoh adat setempat serta pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.
2. Data Sekunder, yaitu data dan informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni literatur-literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu pengumpulan data dengan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan di bahas.

2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan observasi langsung, dengan cara penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang terkait langsung dengan masalah yang penulis angkat dalam tugas akhir ini.

D. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Data dan Informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan.

Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang diperoleh, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualitatif kajian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Tana Toraja

Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas empat suku yaitu Suku Bugis, Suku Makassar, Suku Mandar, dan Suku Toraja. Suku Toraja merupakan salah satu suku terbesar diantaranya dan masyarakatnya menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, sebagian daratan Luwu dan Sulawesi Barat.

Nama Toraja mulanya diberikan oleh suku Bugis Sidenreng dan Luwu. Orang Sidenreng menamakan penduduk daerah ini dengan sebutan *To Riaja* yang mengandung arti “orang yang berdiam di negeri atas atau pegunungan”. Sedangkan orang Luwu menyebutnya *To Riajang* yang artinya adalah orang yang berdiam disebelah barat. Ada juga versi lain yang mengatakan bahwa Toraja adalah *Toraya* yang berasal dari kata *To (Tau)* yang berarti orang dan *Raya* yang berasal dari kata *Maraya* (besar) yang berarti orang-orang besar atau bangsawan. Lama kelamaan penyebutan tersebut berubah menjadi Toraja dengan kata Tana berarti negeri, sehingga tempat pemukiman suku Toraja dikenal kemudian dengan Tana Toraja. Wilayah Tana Toraja juga digelar dengan *Tondok Lili’na Lepongan Bulan Tana Matarik Allo* yang arti harafiahnya adalah negeri yang bulat seperti bulan dan matahari.

Menurut L. T. Tangdilintin, nama Tondok Lepongan Bulan atau Tana Matarik Allo (Tondok=Negeri, Lepongan=Kesatuan, Bulan=Bulan, Tana=Negeri, Matarik=Bentuk, Allo=Matahari) artinya negeri yang bentuk pemerintahan dan kemasyarakatannya sebagai kesatuan yang bulat/utuh bagaikan bentuk bulan dan matahari. Nama Tondok Lepongan Bulan, Tana Matarik Allo bersumber dari terbentuknya negeri itu dalam suatu kebulatan dan kesatuan tata masyarakat yang terjadi berdasarkan:³¹

1. Suatu negeri yang terbentuk atas adanya persekutuan kebulatan berdasarkan atas suatu kepercayaan atau keyakinan masyarakat Toraja dahulu kala. Kepercayaan ini dikenal dengan Aluk Todolo yang bersumber dari negeri Marinding Banua Puang yang dikenal dengan aluk pitung sa'bu pitu ratu' pitung pulo pitu atau aluk sanda pitunna/aluk 777 (agama/kepercayaan 777).
2. Suatu negeri yang dibentuk bulat oleh beberapa daerah adat tetapi menggunakan suatu dasar adat dan budaya yang terpancar (bersumber dari suatu sumber) bagaikan pancaran sinar bulan dan matahari.
3. Suatu kesatuan negeri yang terletak di pada bagian utara pegunungan Sulawesi Selatan yang sekarang dikenal dengan Suku Toraja.

³¹ L.T Tangdilintin, 1975, *Toraja dan Kebudayaanannya*, Yayasan Lempongan Bulan., Toraja, hlm 1.

Tana Toraja merupakan nama sebuah daerah dikawasan Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Makale. Terbentang mulai dari 280 km sampai dengan 355 km dari sebelah Utara ibu kota Sulawesi Selatan (Makassar). Tepatnya 2° - 3° Lintang Selatan dan 100° - 102° Bujur Timur, dengan luas wilayah tercatat 2.054,3 Km² atau sekitar 5% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.

Daerah Tana Toraja adalah merupakan dataran tinggi yang dikelilingi pegunungan dengan keadaan lerengnya curam yakni rata-rata kemiringannya diatas 25%. Kabupaten Tana Toraja terdiri dari pegunungan 35%, dataran tinggi 20%, dataran rendah 38% dan sungai 20% dengan ketinggian yang berkisar antara 300 m s/d 2.800 m diatas permukaan laut.

Bagian terendah adalah daerah kecamatan Bonggakaradeng, sedangkan daerah tertinggi kecamatan Rindingallo dengan temperatur suhu rata-rata berkisar antara 150 C - 180 C dengan kelembapan udara antara 82% - 86%. Curah hujan 1500 mm/th sampai dengan lebih dari 3500 mm/th.

Kabupaten Tana Toraja berbatasan dengan kabupaten-kabupaten lainnya, diantaranya:

- Sebelah Utara : Kabupaten Toraja Utara
- Sebelah Selatan : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu
- Sebelah Barat : Propinsi Sulawesi Barat

Secara administratif sejak tanggal 26 Desember 2008, Kabupaten Tana Toraja telah resmi mengalami pemekaran menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Tana Toraja dengan ibu kota Makale dan Kabupaten Toraja Utara dengan ibu kota Rantepao.

Wilayah pemerintahan Tana Toraja pasca pemekaran terdiri dari 19 (sembilan belas) kecamatan, yaitu Bonggakaradeng, Rano, Simbuang, Mappak, Mengkendek, Gandangbatu Sillanan, Sangalla, Sangalla Selatan, Sangalla Utara, Makale, Makale Utara, Makale Selatan, Saluputti, Bittuang, Rembon, Masanda, Malimbong Balepe, Rantetayo, Kurra.

Pada era reformasi pelaksanaan otonomi daerah secara nyata mulai dibangun dengan menata ulang pemerintahan. Pranata ini dimulai dengan menggabungkan beberapa desa dalam suatu wilayah menjadi satu desa yang disebut *Lembang*. Lembang sebagai pengganti istilah desa merupakan wilayah kesatuan masyarakat adat Tana Toraja, dimana pemerintahannya dilaksanakan oleh Kepala *Lembang* (kepala desa) didampingi oleh ketua adat sebagai penasehat. Kepala Lembang ini pada umumnya merupakan keturunan suatu Tongkonan yang memiliki pengaruh besar dalam suatu wilayah masyarakat.

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Tana Toraja umumnya adalah bertani. Usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat adalah usaha tani tanaman pangan, usaha ternak dan usaha tani tanaman perkebunan dilakukan oleh masyarakat secara bersamaan artinya

dalam satu keluarga biasanya dilakukan usaha tani dan usaha ternak tersebut. Hal ini disebabkan karena hasil dari bertani dan beternak misalnya vanili, kopi, beras, kakao, cengkeh, kerbau, babi, dan ayam digunakan atau dibutuhkan dalam berbagai upacara adat masyarakat Toraja setiap tahunnya.

Saat ini di Tana Toraja terdapat 5 (lima) macam agama yaitu Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu dan Budha. Walaupun mereka sudah menganut agama tersebut di atas tetapi tetap saja ada yang menggabungkan kepercayaan agama-agama tersebut dengan kepercayaan peninggalan nenek moyang yang berbau mistis.

Masyarakat di daerah ini umumnya hidup bergotong royong dan hal ini jelas nyata, umumnya pada waktu mendirikan rumah dan pada pelaksanaan upacara *rambu solo'* dan *rambu tuka'*. Pada kedua upacara adat ini masyarakat sangat kuat memegang tradisi dan adat istiadatnya. Adat dan tradisi ini sebenarnya merupakan kepercayaan dan adat dari nenek moyang masyarakat toraja dahulu disebut *Aluk Todolo*. Tetapi pada saat sekarang ini tidak bermotif demikian tetapi hanya prestise keluarga. Ditinjau dari segi sosial ekonomi dalam upacara *rambu solo'* dan *rambu tuka'* adalah merupakan pesta pemborosan modal dan tenaga akan tetapi ditinjau dari segi budaya/pariwisata karena daerah ini merupakan daerah wisata, upacara adat tersebut merupakan salah satu objek wisata yang sangat menarik bagi wisatawan-wisatawan mancanegara maupun domestik yang

datang di daerah Tana Toraja ini. Umumnya upacara-upacara adat tersebut dilaksanakan setelah selesai panen.

B. Latar Belakang Lembang Tumbang Datu

Lembang Tumbang Datu adalah sebuah daerah yang terletak di Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja. Istilah lembang yang digunakan memiliki arti yang sama dengan desa. Luas Lembang Tumbang Datu yaitu 5,91 km².

Dalam Lembang Tumbang Datu terdapat 2 (dua) kampung (dusun), yakni:

1. Kampung Balik
2. Kampung Bokko

Jumlah Penduduk Lembang Tumbang Datu

Laki- laki	: 433
Perempuan	: 467
Total	: 900

Lembang Tumbang Datu berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara : Lembang Salung Allo
2. Sebelah Timur : Kelurahan Leatung
3. Sebelah Selatan : Kelurahan Bebo
4. Sebelah Barat : Lembang Tallung Penanian

C. Sistem Bagi Hasil Kande Tongkonan Dalam Lembang Tumbang Datu Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja

Tongkonan mempunyai sifat yang mirip dengan hak ulayat. Tongkonan dibangun oleh sekelompok masyarakat adat berdasarkan suatu pertalian keturunan (geneologis) maka pengertian tanah tongkonan dapat dirumuskan sebagai tanah yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat adat atau tongkonan dimana semua anggota tongkonan memiliki atau mempunyai hak yang sama terhadap tanah tersebut berdasarkan atas suatu pertalian keturunan.

Perbedaan diantara keduanya adalah hak ulayat merupakan hak persekutuan yang bersifat teritorial (berdasarkan lingkungan daerah) atas tanah di dalam wilayah kekuasaannya. Sedangkan tanah tongkonan adalah hak sekelompok masyarakat adat yang bersifat geneologis (berdasarkan ikatan darah).

Menurut Agustinus Rungngu' (wawancara 20 April 2016) mengatakan bahwa:

“Tanah tongkonan adalah tanah milik pendiri tongkonan yang tidak terbagi kepada ahli warisnya untuk tetap menyatu dengan tongkonan.”

Menurut P. Gandeng (wawancara 20 April 2016) mengatakan bahwa

“Tanah tongkonan ialah wilayah tongkonan yang langsung di manfaatkan oleh anggota keluarga tongkonan dimana tanah-tanah tersebut berada dibawah penguasaan dan tanggung jawab pendiri tongkonan.”

Tongkonan terdiri dari aluk (agama, hukum agama yang meliputi seluruh aspek hidup, norma dan tata cara dalam masyarakat), benda pusaka, halaman dan lingkungan sekitar seperti tempat menanam bambu dan tanaman buah-buahan, *Uma na pa'lak* (lahan persawahan dan perkebunan), *Pa'lambaran tedong* (lahan peternakan kerbau), *Rante* (Lapangan upacara adat), *Bubun* (Sumur) dan *patane* (liang kubur). Semua itu berfungsi sosial untuk keluarga Tongkonan dan untuk masyarakat sekitarnya.

Didalam kalangan masyarakat Adat Toraja, Tongkonan mempunyai ketentuan-ketentuan dan aturan tentang tatanan kehidupan bagi setiap orang atau rumpun keluarga Tongkonan yang disebut *Aluk* dan *Ada'* yang mengikat dan menuntun tanggung jawab terhadap setiap orang dan atau rumpun keluarga Tongkonan.³²

Seperti yang telah di jelaskan pada materi terdahulu, tanah tongkonan terdiri dari:

- a. Tanah kering yang biasa disebut dengan *Kombong Tongkonan* yaitu suatu wilayah Tongkonan, yang dapat dimanfaatkan langsung oleh anggota Tongkonan yang bersangkutan.
- b. Tanah basah yang berupa sawah Tongkonan (*Kande Tongkonan*) yaitu tanah dalam bentuk sawah yang disiapkan untuk suatu Tongkonan dimana hasil tanah tersebut

³² Tesis Oktavianus Patiung, 2015, *Prinsip-Prinsip Pengaturan Penguasaan Tanah Tongkonan Pada Masyarakat Hukum Adat Toraja*, hlm. 107

dipergunakan bilamana rumah Tongkonan tersebut mengalami kerusakan.

- c. *Rante Tongkonan* yaitu suatu tempat untuk melaksanakan pesta pemakaman dari anggota keluarga Tongkonan apabila ada yang meninggal satu hal mana dilakukan berdasarkan kebiasaan di kalangan masyarakat Toraja.
- d. Lingkungan Tongkonan yaitu berupa kuburan batu atau patane yang terletak di dalam wilayah tanah Tongkonan yang bersangkutan yang merupakan tempat untuk menyimpan mayat dari anggota keluarga Tongkonan yang telah diupacarakan.

Tanah Tongkonan di Toraja pemanfaatannya dikuasakan kepada *To Parengnge'* yang diangkat berdasarkan garis keturunan dari Tongkonan tersebut. Tanah Tongkonan yang asal usulnya pada prinsipnya bahwa merupakan peninggalan orang tua dan asal usulnya adalah hutan/tanah terlantar yang kemudian digarap dan berkembang menjadi tanah yang tidak terbagi kepemilikannya dan dikelola terus oleh keturunannya.

Berbicara tentang bagi hasil, erat kaitannya dengan UU Nomor 2 Tahun 1960 yang menerangkan bahwa bentuk perjanjian bagi hasil dibuat dalam bentuk tertulis dihadapan Kepala Desa, serta disaksikan oleh dua saksi masing-masing dari pihak penggarap dan pemilik tanah dan wajib disahkan oleh Kepala Kecamatan. Untuk jangka waktu bagi hasil yaitu sekurang-kurangnya tiga tahun bagi sawah.

Bagi hasil merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur dalam hukum adat dimana pemilik tanah karena suatu sebab tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya, tetapi ingin mendapatkan hasil atas tanahnya. Oleh karena itu, ia membuat suatu perjanjian bagi hasil dengan pihak lain dengan imbalan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain, perjanjian bagi hasil, adalah suatu bentuk perjanjian antar penggarap, dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasilnya antara penggarap dengan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama.

Perjanjian Bagi Hasil menurut Hukum Adat pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat Hukum Adat antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan umumnya perjanjian tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis tetapi hanya bersifat lisan dengan dasar saling percaya.

Di setiap daerah pelaksanaan bagi hasil sawah pertanian berbeda dan memiliki cara tersendiri dalam pelaksanaannya. Di daerah Minangkabau (Sumatera Barat) perjanjian bagi hasil dikenal dengan istilah *memperduai* atau *babuek sawah urang* dalam kenyataannya dilakukan secara lisan dihadapan kepala adat. Imbalan hasil tergantung pada kesuburan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman dan sebagainya. Apabila bibit disediakan oleh pemilik tanah maka hasilnya dibagi dua antara pemilik tanah dan penggarap tanpa memperhitungkan nilai, benih serta pupuk, lain halnya apabila tanah kering atau sawah

ditanami palawija, dimana pemilik tanah menyediakan bibit dan pupuk, maka hasilnya di bagi dua, akan tetapi memperhitungkan harga bibit dan pupuk. Perjanjian ini disebut dengan *sadua bijo*.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan, bagi hasil yang terjadi pada masyarakat Tana Toraja hanya berlaku pada tanah basah. Tanah basah yang berupa sawah Tongkonan, hasil pengelolaan tersebut dapat dibagi hasilkan. Sedangkan untuk tanah kering yaitu berupa kebun, tanaman dan bambu tidak dapat dibagi hasilkan. Hasil dari pengelolaan tanah tersebut hanya dapat dinikmati bersama. Apabila anggota Tongkonan ingin menikmati atau membutuhkan hasil dari pengelolaan tersebut terlebih dahulu harus meminta izin kepada orang yang menjaga tongkonan.

Dalam masyarakat Tana Toraja, pelaksanaan bagi hasil masih menggunakan hukum adat yaitu *aluk todo* dan kebiasaan turun temurun sejak lama. Masyarakat Tana Toraja tidak menggunakan ketentuan yang berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil pertanian, dimana layaknya suatu perjanjian itu harus diperjanjikan terlebih dahulu secara tertulis dan dilakukan dihadapan Kepala Desa. Selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap, maka dapatlah dikatakan bahwa, perjanjian yang diadakan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian.

Karena bagi hasil yang dilakukan pada masyarakat Tana Toraja dalam bentuk lisan serta berdasarkan kata sepakat diantara pemilik dan penggarap, maka isi dari kesepakatan yang mereka buat yaitu apabila bagi hasil di bagi 2 maka si penggarap wajib menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian *talitak* kepada tongkonan serta untuk biaya yang di perlukan seperti pupuk, bibit dan biaya pajak di tanggung oleh si penggarap, jika di bagi 3 (*tallung tepo*) upah penggarap (*pendulu*) $\frac{3}{4}$ bagian (*pa'tesan*) dan bagian pemilik (*talitak*) $\frac{1}{4}$ (*sangtepo*).

Bagi hasil yang terjadi pada masyarakat Tana Toraja berbeda pada bagi hasil yang pada umumnya. Dalam bagi hasil yang menjadi objeknya adalah hasil dari pengelolaan sawah dimana sawah tersebut merupakan sawah tongkonan sedangkan subyeknya adalah pemilik dan penggarap dimana pemilik dan penggarap merupakan orang dari Tongkonan.

Sawah Tongkonan yang lazimnya disebut dengan *kande tongkonan* merupakan bagian dari tanah *mana'*. Artinya sawah tongkonan merupakan sawah pusaka yang tidak terbagi kepemilikannya kepada ahli warisnya. Tanah *mana'* yaitu tanah pusaka tinggi yang tidak terbagi-bagi yang sebagian besar dahulunya adalah hutan atau tanah-tanah terlantar yang belum digarap, kemudian dikuasai atau digarap dalam jangka waktu yang lama.³³

³³ Agustinus Runggu (To Parengnge' Lembang Tumbang Datu), wawancara 21 April 2016

Pada masyarakat Tana Toraja proses penggarapan sawah beraneka macam dilakukan. Ada yang menggunakan sistem bergilir (*disitaunni*) oleh keluarga Tongkonan, dan ada pula yang menggarap merupakan orang dari Tongkonan yang di percayakan dari keluarga Tongkonan untuk mengelola sawah Tongkonan. Selain daripada itu ada juga yang dikelola oleh orang diluar Tongkonan tetapi harus mendapat persetujuan dari semua rumpun keluarga Tongkonan apabila ingin menggarap sawah tersebut.³⁴

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Lembang Tumbang Datu yaitu sistem penggarapan sawah bergilir (*uma disitaunni*). Sistem penggarapan bergilir ini dilakukan oleh keluarga Tongkonan. Untuk pelaksanaan dan pengelolaannya seperti contoh berikut: A:B:C:D adalah anak dari pendiri Tongkonan, bergiliran mengelola sawah tongkonan dan A:B:C:D masing-masing mempunyai 4 (empat) orang anak. Dalam pergilirannya, yang pertama mendapat giliran adalah A dan seterusnya, apabila salah satu diantara mereka ada yang meninggal maka akan digantikan oleh anak mereka. Misalnya A yang meninggal, jika tiba giliran A, maka ke empat anaknya akan menggantikannya dan hasilnya akan dibagi empat oleh anak A. Proses pergiliran selanjutnya sama antara saudara yang lain dan keturunan lainnya. Dalam proses penggarapan bergilir tetap ada bagian pemilik Tongkonan (*talitak*) yaitu $\frac{1}{4}$ (*sangtepo*) yang di keluarkan untuk

³⁴ P. Gandeng (tokoh masyarakat Lembang Tumbang Datu), wawancara 22 April 2016

disimpan di Tongkonan dan hasil dari sawah tersebut dipakai pada saat upacara adat seperti *rambu solo'* dan *rambu tuka*. Dan upah untuk penggarap (*pendulu*) itu memperoleh $\frac{3}{4}$ bagian juga dari hasil tanah yang dikelola. Untuk jangka waktu dalam penggarapan bergilir tidak ada batasan, tetapi biasanya ketika setelah selesai panen baru pindah penggarapan.

Dalam masyarakat Tana Toraja hanya sebagian masyarakatnya masih menggunakan sistem bergilir, selebihnya itu dalam pengelolaan sawahnya dikelola oleh orang dari tongkonan/anggota tongkonan sendiri. Hasil dari pengelolaannya juga beraneka macam tergantung dari kesepakatan keluarga, ada yang hasil panennya dijual untuk memperbaiki tongkonan, ada yang dipergunakan untuk keperluan adat dimana hasil tersebut di pakai untuk makan bersama dengan orang tongkonan apabila dalam upacara adat seperti *rambu solo'* dan *rambu tuka'*.³⁵

Seiring dengan berjalannya waktu bagi hasil mengalami perkembangan. Dulu bagi hasil hanya dibagi 2 yaitu antara pemilik dan penggarap dengan perolehan $\frac{1}{2}$ untuk pemilik tongkonan dan $\frac{1}{2}$ dari hasil milik penggarap. Masyarakat Toraja pada saat itu belum mengenal traktor dalam proses penggarapan serta belum terlalu besar biaya yang dikeluarkan. Selain dari pada itu masyarakat Toraja, dalam setahun hanya sekali panen. Pada saat sekarang bagi hasil dibagi 3 (*tallung*

³⁵ Simbong Ranteallo (Seketaris Camat Sangalla Utara), wawancara 23 April 2016

tepo) dengan perolehan $\frac{1}{4}$ (*sangtepo*) bagian untuk pemilik (*talitak*) dan $\frac{3}{4}$ (*pa'tesan*) bagian untuk penggarap. Karena untuk biaya dalam penggarapan sawah seperti pajak, bibit dan biaya lainnya dikeluarkan terlebih dahulu dan di tanggung oleh penggarap.³⁶

Talitak merupakan hasil dari tanah tongkonan yang berbentuk sawah dimana merupakan bagian dari pemilik dan modal dari tongkonan. Dimana *talitak* disimpan bertahun-tahun di lumbung padi (*alang*) dan akan di pergunakan dalam upacara adat seperti pesta *rambu solo'* dan *rambu tuka'*. Ada pula hasil *talitak* dipergunakan untuk perbaikan tongkonan berdasarkan kesepakatan keluarga. Mengenai *talitak* sendiri tidak ada jumlah batasan yang diberikan karena tergantung dari hasil panen. Dalam setahun bisa 2 kali panen tergantung dari cuaca dan jenis padi yang digunakan.³⁷

Didalam kalangan masyarakat Adat Toraja, Tongkonan mempunyai ketentuan-ketentuan dan aturan tentang tatanan kehidupan bagi setiap orang atau rumpun keluarga Tongkonan yang disebut *Aluk* dan *Ada'* yang mengikat dan menuntun tanggung jawab terhadap setiap orang dan atau rumpun keluarga Tongkonan.

Tongkonan menjadi rumah yang telah diwarisi secara turun temurun. Pemilik Tongkonan menjadikan warisan Tongkonan untuk dimanfaatkan bersama oleh seluruh keturunan dalam sebuah Tongkonan.

³⁶ Agustinus Runggu (To Parengnge" Lembang Tumbang Datu), wawancara 22 April 2016

³⁷ YK.Galla (Hakim Adat Lembang Tumbang Datu), wawancara 23 April 2016

Tongkonan dan tanah tongkonan merupakan contoh harta pusaka tinggi yang pemanfaatannya diatur oleh pemangku adat (*To Parengnge'*) dari tongkonan tersebut. Contoh pemanfaatannya untuk pelaksanaan upacara *Rambu Tuka'* dan *Rambu Solo'*, dimana harta tersebut tidak dapat dibagi-bagi penguasaan dan pemilikannya karena merupakan pusaka dari para leluhur yang dijaga keutuhannya demi kehormatan dan martabat keluarga. Sedangkan sistem kewarisan individual berlaku pada harta pusaka rendah, yang merupakan harta yang berasal dari hasil mata pencaharian ayah dan ibu. Emas dan sawah yang dimiliki orang tua merupakan contoh harta pusaka rendah yang dapat dibagi-bagi penguasaan dan pemilikannya sesuai hak dan kepentingan ahli warisnya. Pembagian harta warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga, dengan tujuan para ahli waris dapat memanfaatkan harta yang diberikan untuk kesejahteraan dengan tetap menjunjung tinggi persatuan dan rasa kekeluargaan.

Pengelolaan tanah Tongkonan dilakukan oleh keturunan yang bermukim di lokasi tanah tersebut. Setiap keturunan dari pemilik tanah Tongkonan berhak untuk tinggal dan membangun di atas tanah Tongkonan dengan syarat sepanjang mereka ikut berpartisipasi memelihara dan menjaga tanah milik keluarga tersebut. Dalam artian apabila rumah Tongkonan berdasarkan musyawarah keluarga ingin diperbaharui atau diperbaiki maka seluruh biaya membangun rumah itu dipikul oleh seluruh keturunan pemilik tanah Tongkonan. Boleh tidaknya

seorang keturunan membangun dan mendiami di atas tanah tersebut ditentukan dalam rapat keluarga. Apabila seorang keturunan tidak lagi ikut memberi sumbangan bila ada perbaikan-perbaikan rumah adat dalam areal tanah Tongkonan tersebut maka biasanya rapat keluarga akan memutuskan tidak menerima anggota keturunan tersebut menetap di areal tanah Tongkonan maupun mengambil manfaat di atas tanah Tongkonan tersebut.³⁸

Jika tanah Tongkonan diserahkan untuk sementara kepada orang lain untuk digarap, terlebih dahulu, harus mendapat izin dari pimpinan Tongkonan dan setiap habis panen wajib menyerahkan sebagian hasil panen sebagai pembayaran atau masukan kepada pimpinan Tongkonan. Di dalam pembayaran tersebut masih dikeluarkan untuk Tongkonan/rumpun keluarga misalnya jika ada acara *rambu solo'* atau *rambu tuka'* dan untuk membayar PBB (Pajak Bumi).

Dalam adat Toraja dikenal pula istilah *Ba'gi* (dikhususkan). *Ba'gi* adalah warisan yang diistimewakan karena hal-hal tertentu, misalnya seorang anak yang selama hidupnya tinggal dan mengabdikan kepada orang tuanya, atau dari sekian bersaudara anak tersebut merupakan satu-satunya anak yang berjenis kelamin laki-laki ataupun satu-satunya berjenis kelamin perempuan. Ada juga yang di *ba'gi* karena kedekatan dengan pewaris sekalipun anak tersebut bukan merupakan darah daging pewaris (anak angkat). Pewarisan tersebut dikenal dengan

³⁸ Tesis Oktavianus Patiung, 2015, *Prinsip-Prinsip Pengaturan Penguasaan Tanah Tongkonan Pada Masyarakat Hukum Adat Toraja*, hlm. 105

sebutan *Ma'rinding*. Sawah merupakan objek waris atau tanah yang bisa dibagikan kepada keturunan dari Tongkonan dengan cara di *ba'gi* (hibah). Oleh sebab itu, seorang anak Tongkonan tidak boleh memotong kerbau apabila pada dirinya memang tidak memiliki harta untuk itu, tetapi apabila ada sawah warisan maka pasti ada kerbau untuk pengorbanan atau dapat diadakan.³⁹

D. Peran Lembaga Adat Tongkonan Dalam Penyelesaian Sengketa Bagi Hasil Kande Tongkonan

Lembaga adat merupakan organisasi kemasyarakatan yang hidup dalam suatu masyarakat adat yang memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan maupun menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam suatu masyarakat adat.

Keberadaan lembaga adat dalam komunitas harus diakui dan diterima oleh seluruh anggota komunitas adat-istiadat serta tradisi yang semakin tumbuh berkembang secara dinamis dalam menghadapi perubahan dari waktu ke waktu. Keberadaan lembaga adat sendiri dapat menjadi suatu bentuk kekuatan masyarakat untuk dapat menjadi mediator sekaligus wadah permusyawaratan/permufakatan oleh para pengurus adat dalam masyarakat adat itu sendiri.

Pada dasarnya dalam setiap daerah masing-masing memiliki kelembagaan masyarakat adat tersendiri. Selain untuk menjaga nilai

³⁹ *Ibid*, hlm 122.

budaya dan luhur, setiap lembaga adat juga memiliki tugas dan fungsi tersendiri dalam pelaksanaannya. Mereka juga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda pula, seperti nilai, norma, budaya, aturan hukum-hukum adat, hingga struktur lembaga adat itu sendiri. Seperti halnya pada kelembagaan adat pada masyarakat Toraja. Masyarakat Toraja merupakan masyarakat yang hingga saat ini sangat memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan budayanya serta memegang teguh dan memelihara adat istiadat mereka di tengah era modern sekarang.

Lembaga adat dalam masyarakat Toraja secara umumnya berperan sebagai suatu wadah bagi masyarakat adat itu sendiri dimana mereka bertugas sebagai pengayom masyarakatnya. Secara khusus, lembaga adat Toraja menjadi suatu media penyelesaian masalah maupun konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Lembaga adat di Toraja memiliki fungsi yang sangat kuat. Status sosial pada masyarakat Toraja dikenal dengan Istilah *Tana'*. Pada masyarakat Toraja terdapat perbedaan status sosial yang berbeda-beda, mulai dari yang tinggi, sedang dan rendah. Setiap Tongkonan memiliki struktur lembaga yang mengatur Tongkonan tersebut. Stratifikasi tersebut dikenal dengan tingkatan berikut⁴⁰:

- a. *Tana' Bulaan/Toparengnge* yang merupakan kasta tertinggi.

Pada umumnya golongan bangsawan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat karena mereka

⁴⁰ *Ibid*, hlm 110-111.

bertugas menciptakan aturan-aturan yang kemudian menjadi ketua pemerintahan adat tertinggi dalam masing-masing adat/kelompok adat, misalnya raja dan kaum bangsawan. Mereka juga menguasai tanah persawahan di Toraja.

- b. *Tana' Bassi/Tomakaka*. *Tana' bassi* adalah bangsawan menengah yang sangat erat hubungannya dengan *Tana' Bulaan*. Mereka adalah golongan bebas, mereka memiliki tanah persawahan tetapi tidak sebanyak yang dimiliki oleh kaum bangsawan, mereka ini adalah para tokoh masyarakat, orang-orang terpelajar, dan lain-lain. Kasta ini yang menjabat jabatan pembantu *Tana' Bulaan* atau anggota pemerintahan adat.
- c. *Tana' Karurung*. Kasta ini merupakan rakyat kebanyakan atau sering disebut *pa'tondokan*. Golongan ini tidak mempunyai kuasa apa-apa tetapi menjadi tulang punggung bagi masyarakat toraja. Kasta ini menjabat sebagai pembantu pemerintahan adat serta menjadi petugas/pembina *aluk todolo* untuk urusan *aluk patuoan* dan *aluk tananan*.
- d. *Tana' Kua-Kua/Kaunan*. Golongan kasta ini merupakan pengabdian atau hamba bagi *Tana' Bulaan* dengan tugas-tugas tertentu. Misalnya membungkus orang mati dan lain-lain, mereka sangat dipercaya oleh atasannya karena nenek moyang mereka telah bersumpah turun-temurun akan

mengabdikan dirinya, akan tetapi atasannya juga mempunyai kewajiban untuk membantu mereka dalam kesulitan hidupnya. Golongan ini tidak boleh kawin dengan kelas yang lebih tinggi, seperti *Tana' Bulaan* dan *Tana' Bassi*.

Setiap daerah adat besar terdiri dari beberapa kelompok adat yang dikuasai oleh satu badan musyawarah adat yang disebut *Kombongan Ada'*. *Kombongan Ada'* sebagai pilar demokrasi dan sebagai wadah yang mengawal dinamika adat sesuai perubahan kebutuhan masyarakatnya. Setiap *Kombongan Ada'* memiliki beberapa penguasa adat kecil disebut *Lembang*. Di daerah lembang masih terdapat penguasa adat wilayah yang disebut *Bua'*.

Persoalan yang sering terjadi dalam masyarakat Tana Toraja baik antar sesama rumpun keluarga tongkonan maupun yang terjadi dengan pihak di luar tongkonan mengenai tanah tongkonan beraneka ragam. Penyebab terjadinya sengketa tersebut antara lain adanya pihak luar yang mengklaim tanah tongkonan sebagai tanah miliknya, salah satu anggota keluarga yang ingin memiliki tanah tongkonan secara pribadi, sengketa mengenai hasil panen sawah (*uma*) tongkonan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam penyelesaian sengketa tanah tongkonan khususnya sengketa bagi hasil sawah diselesaikan dengan cara musyawarah dalam rumpun keluarga dengan menghadirkan anggota keluarga dan dipimpin oleh salah seorang

anggota tongkonan yang dituakan. Namun apabila tidak menemui kesepakatan diantaranya, maka penyelesaiannya dapat ditangani oleh lembaga adat setempat.

Dalam pelaksanaan musyawarah keluarga, yang bermusyawarah terdahulu mendengarkan pandangan dan pendapat dari masing-masing anggota yang hadir serta solusi dari *To Parengnge'*, barulah para pihak yang bersengketa mengemukakan pendapatnya. Apabila dalam musyawarah keluarga juga tidak berhasil mendamaikan yang bersengketa, maka masalah dapat diajukan ke lembaga adat.

Dalam penyelesaian di peradilan adat/lembaga adat juga serupa dengan proses yang terjadi dalam musyawarah keluarga. Pertama di ajukan ke lembaga adat tingkat *lembang*. Musyawarah ini di hadiri hakim adat pendamai oleh pemangku adat dalam *lembang* serta tokoh-tokoh masyarakat yang di anggap mampu memberikan pengarahan dan saran.

Penyelesaian ini hakim adat pendamai memanggil pihak yang bersengketa dengan menghadirkan para saksi dari masing-masing pihak, kemudian dimintai keterangan. Dari keterangan ini dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Apabila dari pihak yang bersengketa tidak menerima hasil keputusan maka dilanjutkan ke tingkat kecamatan dengan proses yang sama.

Adapun prosedur yang ditempuh para pihak untuk penyelesaian adat di tingkat kecamatan, sama halnya dengan prosedur penyelesaian di

tingkat lembang/kelurahan. Demikian pula, apabila keputusan yang diambil di tingkat kecamatan juga belum diterima oleh salah satu/kedua belah pihak yang bersengketa, maka pemerintah kecamatan memberikan surat rekomendasi agar para pihak dapat melanjutkan sengketa tersebut ke tahap pengadilan (jalur litigasi). Adapun yang terjadi selama ini adalah sebagian besar sengketa, khususnya sengketa tanah tongkonan dapat diselesaikan oleh lembaga adat di tingkat lembang/kelurahan.⁴¹

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Simbong Ranteallo, Seketaris Camat Sangalla Utara (wawancara Selasa, 22 April 2016), penyelesaian secara adat lebih di utamakan yaitu dalam bentuk musyawarah keluarga. Dan setiap permasalahan sengketa yang terjadi diupayakan tidak berakhir pada tingkat kecamatan. Karena pada masyarakat Toraja masih mengenal budaya rasa malu apabila sengketa yang terjadi antar keluarga di dengar oleh orang lain. Selain daripada itu UU Desa mengenai hak-hak desa sudah diatur bahwa persoalan yang terjadi dapat diselesaikan oleh tokoh masyarakat. Sekarang proses penyelesaian sengketa jarang selesai pada tingkat kecamatan maupun pengadilan.

Lembaga adat dalam menjalankan fungsinya baik di tingkat lembang/kelurahan maupun tingkat kecamatan, selalu berjalan beriringan dengan pemerintah setempat. Dalam hal pengambilan

⁴¹ Skripsi Siti Hardiyanti Akbar, 2015, *Fungsi Lembaga Adat Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan Di Kabupaten Tana Toraja*,. hlm. 87.

kebijakan, pemerintah selalu meminta saran dan masukan dari lembaga adat setempat agar kebijakan yang diambil tidak menyimpang dari ketentuan adat-istiadat yang dianut masyarakat. Selain itu, lembaga adat dianggap mewakili aspirasi dari masyarakat adat setempat, sehingga pemerintah seringkali melibatkan lembaga adat dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Dengan demikian keberadaan lembaga adat diakui eksistensinya karena keberhasilan lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

Lembaga adat terdiri dari pemangku adat (*To Parengnge'*), hakim adat, dan tokoh-tokoh masyarakat yang saling berkoordinasi dan membangun kerjasama dalam menjalankan fungsinya.

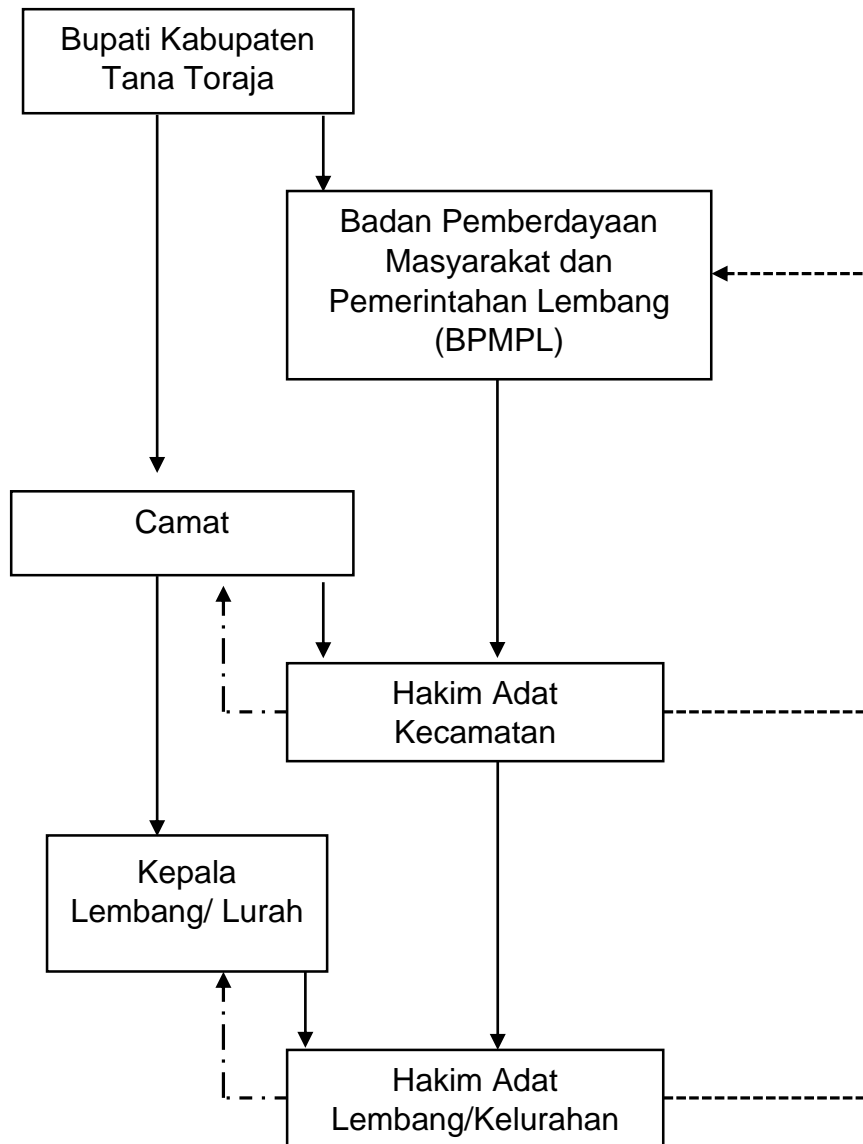
Pemangku adat (*To Parengnge'*) merupakan jabatan adat yang diwarisi secara turun-temurun dalam sebuah rumpun keluarga tongkonan. Pemangku adat (*To Parengnge'*) berkedudukan di setiap tongkonan, sebagai orang yang dituakan dalam tongkonan yang bersangkutan dan ditunjuk oleh pihak keluarga untuk mengurus serta menjaga harta pusaka keluarga, baik banua tongkonan itu sendiri maupun harta pusaka lainnya agar tetap utuh dan tidak terbagi-bagi sehingga dapat terus menyatukan seluruh rumpun keluarga.

Adapun struktur kelembagaan pemerintahan Tana Toraja seperti pada gambar table berikut ⁴²:

⁴² *Ibid*, hlm 72-73.

Gambar 1

Struktur Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja



Bupati Kabupaten Tana Toraja memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur pemerintahan, yang dalam hal ini membawahi BPMPL sebagai perangkat daerah tingkat kabupaten, Camat sebagai pemerintah kecamatan, dan Kepala Lembang/Lurah sebagai pemerintah lembang/kelurahan. BPMPL sebagai pemerintah kabupaten, membidangi hal-hal terkait pemberdayaan masyarakat termasuk di dalamnya mengenai hakim adat, baik dalam hal pembentukannya maupun dalam hal penerimaan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas oleh hakim adat yang selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati Tana Toraja. Dengan demikian, BPMPL secara struktural membawahi hakim adat tingkat kecamatan dan lembang/kelurahan. Sedangkan dalam lingkup kecamatan, Camat sebagai pejabat tertinggi kecamatan, membawahi semua perangkat-perangkat kecamatan termasuk hakim adat kecamatan, sehingga dalam menjalankan fungsinya hakim adat wajib diketahui dan disetujui oleh Camat setempat.

Demikian pula halnya dalam lingkup lembang/kelurahan, hakim adat dalam menjalankan fungsinya wajib diketahui dan disetujui oleh Kepala Lembang/Lurah. Selanjutnya, arah panah dengan garis putus-putus (----►) menunjukkan hakim adat dan BPMPL dalam menjalankan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Tana Toraja. Sedangkan arah panah dengan garis putus-putus panjang dan pendek (- · - · ►) menunjukkan bahwa hakim adat dalam menjalankan fungsinya

wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah kecamatan dan lembang/kelurahan setempat.

Berikut adalah contoh sengketa mengenai tanah tongkonan⁴³

I. Sengketa Tanah Tongkonan Lando

Sengketa mengenai tanah (sawah) tongkonan Lando berlokasi di lingkungan Kalimbubu', Kelurahan Tengan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Sengketa tersebut terjadi dalam rumpun keluarga, antara H. Paberu, dkk sebagai pihak pelapor dan Sumule, dkk sebagai pihak terlapor. Adapun yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah berupa sawah seluas 1 (satu) hektar yang berasal dari tongkonan Lando.

Sawah Lando merupakan warisan dari Ne' Bodo' (anggota keluarga yang tinggal di tongkonan/pa'kampa tongkonan) kepada anak cucunya sebagai milik bersama untuk tempat mencari nafkah. Karena status sawah tersebut adalah milik bersama, maka hasil dari sawah tersebut, juga harus dinikmati bersama oleh keluarga. Dalam hal ini, ada anggota keluarga yang dipercaya untuk menggarap sawah tersebut, lalu hasilnya dapat dinikmati oleh penggarap sawah dan ada bagian pula untuk tongkonan. Penggarapan sawah menggunakan sistem bagi hasil panen (talitak) dengan hitungan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian untuk penggarap sawah dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian bagi pemilik sawah (tongkonan). Ada

⁴³ *Ibid*, hlm 91

pula yang menggunakan hitungan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk penggarap sawah dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian bagi pemilik sawah.

Pada saat itu, yang bertindak sebagai penggarap dari sawah Lando adalah terlapor. Karena itu, sudah menjadi kewajiban terlapor untuk menyerahkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian hasil panen kepada keluarga, yang diserahkan melalui tongkonan. Namun, yang terjadi adalah terlapor hanya menikmati sendiri hasil panen dari sawah tersebut tanpa menyerahkan sebagian hasil panen (*talitak*) kepada tongkonan sebagai tanda bahwa sawah masih milik bersama keluarga. Hal tersebut dinilai pelapor sebagai suatu kekeliruan, sehingga diadakanlah pertemuan keluarga untuk membahas dan menyelesaikan masalah tersebut. Tidak tercapainya kesepakatan dalam lingkungan keluarga, membuat pelapor melaporkan masalah tersebut kepada pemerintah Kelurahan Tengan untuk didamaikan oleh lembaga adat agar hubungan kekeluargaan antara para pihak kembali menjadi harmonis.

Dengan demikian, pada tanggal 30 Januari 2014 diadakan pertemuan oleh pemerintah dan lembaga adat (dalam hal ini hakim adat) untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah tersebut. Adapun keputusan yang tercapai saat itu adalah:

1. Pemerintah Kelurahan Tengan bersama hakim adat tingkat kelurahan, menginginkan kedua belah pihak yang bermasalah kembali membicarakan dengan baik demi terciptanya hubungan keluarga yang harmonis.

2. Bahwa sawah tersebut adalah warisan dari Ne' Bodo' dan hasil panen (talitak) akan dikumpulkan di tongkonan.

Keputusan yang diambil oleh hakim adat kelurahan saat itu dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga sengketa tidak berlanjut ke tahap penyelesaian adat tingkat kecamatan. Adapun akibat hukumnya bahwa terlapor yang merupakan penggarap sawah Lando harus menyerahkan bagian hasil panen (talitak) kepada keluarga, yang diserahkan melalui tongkonan.

Penyelesaian sengketa yang terjadi, khususnya mengenai sengketa tanah Tongkonan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:⁴⁴

- 1) Penyelesaian secara kekeluargaan. Rumpun keluarga berkumpul di rumah tongkonan untuk bersama-sama membicarakan dan mencari solusi atas sengketa tersebut.
- 2) Penyelesaian di tingkat Lembang. Apabila tidak menemukan kesepakatan dalam musyawarah keluarga maka dapat dilanjutkan ke tingkat lembang dengan melibatkan kepala lembang dan tokoh-tokoh adat dan menghadirkan semua masyarakat.
- 3) Penyelesaian di tingkat Kecamatan. Jika salah satu atau kedua belah pihak belum menerima keputusan di tingkat lembang, maka dapat dilanjutkan di tingkat kecamatan.

⁴⁴ Tesis Oktavianus Patiung, 2015, *Prinsip-Prinsip Pengaturan Penguasaan Tanah Tongkonan Pada Masyarakat Hukum Adat Toraja*, hlm. 116

Penyelesaian di tingkat kecamatan bisa juga digabungkan dengan penyelesaian di tingkat Lembang dengan cara, camat dan aparatnya di panggil oleh kepala lembang untuk menghadiri penyelesaian sengketa di tingkat Lembang.

- 4) Penyelesaian di Tingkat Pengadilan. Apabila keputusan tingkat kecamatan belum juga di terima maka salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada masa lalu, masyarakat Toraja sangat menghindari penyelesaian sengketa di Tingkat Pengadilan. Selain budaya Longko” (budaya malu), juga mengantisipasi semakin retaknya hubungan kekeluargaan diantara mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bagi hasil yang dilakukan masyarakat Toraja dilaksanakan dalam bentuk lisan serta kebiasaan *aluk todolo*. Dalam pelaksanaannya, masyarakat Toraja berpedoman dengan ketentuan hukum adat. Dalam pelaksanaannya, masyarakat Toraja menggunakan sistem bergilir (*disitaunni*) oleh keluarga Tongkonan, dan ada juga yang dikelola dari orang Tongkonan sendiri. Bagi hasil juga mengalami perkembangan, ada yang dibagi 2 dengan bagian penggarap (*pendulu*) dan pemilik (*talitak*) memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, dan ada juga yang dibagi 3 dimana bagian penggarap (*pendulu*) memperoleh $\frac{3}{4}$ (*pa'tesan*) bagian, sedangkan bagian pemilik (*talitak*) memperoleh $\frac{1}{4}$ (*sangtepo*) bagian. Untuk bagian pemilik dipergunakan untuk keperluan adat dan untuk perbaikan tongkonan. Bagi hasil yang terjadi pada masyarakat Tana Toraja hanya berlaku pada tanah basah, sedangkan untuk tanah kering hanya dapat dinikmati hasil pengelolaannya oleh keluarga Tongkonan.
2. Lembaga adat di Tana Toraja mempunyai peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa ataupun persoalan yang ada. Masyarakat Tana Toraja dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi dilakukan dengan musyawarah keluarga

untuk menghindari terjadinya perpecahan antara keluarga Tongkonan. Jika dengan cara ini tidak menemukan penyelesaian maka dibawa ke lembaga adat pendamai tingkat *lembang*, apabila penyelesaian sengketa/persoalan tersebut masih belum selesai juga maka ke lembaga adat pendamai tingkat kecamatan.

3. Selaras dengan perkembangan zaman sengketa yang terjadi antar keluarga Tongkonan mengalami pergeseran nilai dan ekonomi.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan kesadaran hukum sebaiknya masyarakat Toraja mengadakan penyuluhan, terutama mengenai peraturan tentang pertanian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Pertanian dan Peraturan Pelaksanaan.
2. Peran pemangku adat lebih ditingkatkan dalam mengantisipasi persoalan yang timbul antar keluarga tongkonan sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan secara adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Harris Asy'arie, 2005, *Tinjauan Terhadap Hukum Adat Masyarakat Dayak Benuaq Kalimantan Timur*. Kalimantan Timur: Humas Pemprov Kaltim.
- Andi Suriyaman M. Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana.
- Aminuddin Salle, dkk. 2010. *Hukum Agraria*, Makassar: Aspublishing Makassar.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya, jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- , 2005, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Bushar Muhammad, 2006, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia - Suatu Pengantar*, Bandung: Rafika Aditama.
- Effendi Perangin, 1989, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- K. Wantjik Saleh, 1982, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- L.T. Tangdilintin, 2014, *Toraja dan Kebudayaanannya*. Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan.
- Muchsin, dkk. 2010. *Hukum Agraria Indonesia, Dalam Perspektif Sejarah*. Bandung: Refika Aditama.
- Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ter Haan Bzn, 2011, "Asas-asas dan Tatahan Hukum Adat". Bandung: Mandar Maju.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.

Sumber Lain :

<http://www.torajaparadise.com/2014/11/orang-toraja-dan-makna-tongkonan.html> diakses pada Kamis 21 Januari pukul 19:10 WITA.

www.sumbawakab.go.id/images/downloads/23._LEMBAGA_ADAT.doc
kedudukan dan fungsi lembaga adat diakses pada tanggal 9
Februari 2016 pukul 05.20 WITA.

Skripsi dan Tesis :

Yoona Pongpabia. 2013. *Penyelesaian Sengketa Terhadap Kepemilikan Tanah Tongkonan Di Daerah Tana Toraja (Studi Kasus Putusan No.34/Pdt.G/2008/PN.Mkl)*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.

Skripsi Siti Hardiyanti Akbar. 2015. *Fungsi Lembaga Adat Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan Di Kabupaten Tana Toraja*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.

Oktavianus Patiung. 2015. *Prinsip-Prinsip Pengaturan Penguasaan Tanah Tongkonan Pada Masyarakat Hukum Adat Toraja*. Universitas Hasanuddin Makassar.

LAMPIRAN